

Skripsi

**PENGARUH INFORMASI PERPERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL
COMMUNITY CLUSTER* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ARIF
105730431013**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL COMMUNITY*
CLUSTER TERHADAP TINGKAT KEPATUAHAN WAJIB PAJAK
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**ARIF
105730431013**

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

HALAMAN PERSETUJUAN

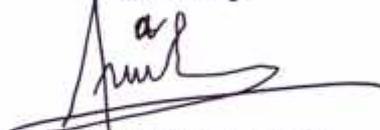
Judul Skripsi : Pengaruh Informasi Perpajakan Berbasis Social
Comuniti Cluster Terhadap Tingkat Kepatuhan
WajibPajak Kantor PelayananPajakPratama Makassar
Selatan
Nama Mahasiswa : Arif
Stambuk : 10573 04310 13
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jum'at, 25 Mei 2018 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar,25 Mei 2018

Menyetujui

Pembimbing I


Jamaluddin, M.SE.,M.Si.

Pembimbing II

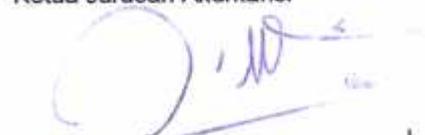

Mira, SE, M.Ak.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM :1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Arif, Nim : 105730431013 , diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 044 Tahun 1439 H/ 2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Jum'at, 25 Mei 2018, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Ramadhan 1439H
25 Mei 2018M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
2. Muchriana Muchran, SE., M.Si., (.....)
Ak., CA.
3. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., (.....)
CA.
4. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)

MOTTO

“ Berdoalah (mintalah) kepadaKU (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu ”. (QS. Al-Mukmin : 60)

“ Lanjutkanlah pendidikan kemanapun kamu mau dan sampai mana kemampuanmu kami berdua hanya bisa mendoakanmu dari belakang “ (Ibu, Keluarga Tercinta)

“ Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future”

“ Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan “ (Penulis)

ABSTRAK

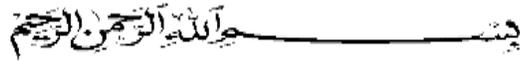
ARIF. 2018. Pengaruh Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Jamaluddin dan Pembimbing II Mira

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa tax expo, Sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan Perusahaan tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang masyarakat wajib pajak Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berupa tax expo, sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Hal ini terbukti dengan pengujian hipotesis melalui hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,911 yang berarti bahwa hubungan antara *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berupa tax expo, sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 91,1%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dalam 9,706 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena profitabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Atau bisa dikatakan bahwa *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kata Kunci: *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster, Tax Expo, Sosialisasi Pajak, Brosur Pajak, Website Pajak, Wajib Pajak.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling bijak diberikan selain mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan karunia kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita semua, terutama keimanan, keislaman dan kekuatan khususnya kepada penulis sehingga telah menyelesaikan penelitian pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan

Penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik meteril maupun moril. Terutama dari kedua orang tua tersayang, ibunda **Sabaria** dan ayahanda **Pawallangi, Saudara Saudariku**, dan Teman-Teman seperjuangan AK,7,013 Dan terumah sahabat terbaik yaitu Adam, Jumriani nadir, kheruddin, Endang, Nurirawanti... Terima kasih atas kebarsamaan dan bantuannya selama ini. Pada kesempatan kali ini peneliti juga tak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Bapak Jamaluddin, M, SE, M.Si selaku Pembimbing I

5. Ibu Mira, SE., M.Si.Ak selaku Pembimbing II
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaraan perkuliahaan sampai akhir studi.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan banyak didikan, bimbingan, dukungan dan doa terumah dari segi financial, demi masa depan penulis
8. Almamater yang saya banggakan
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan pada “lampiran ucapan terimakasih” dalam laporanini.

Penelitian menyadari bahwa dalam penelitian ini tak luput dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis, oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah berikutnya. Peneliti menyambut baik bagi peneliti berikutnya yang berminat menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya peneliti sendiri.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Mei 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
.....	1
B. Rumusan Masalah.....	
.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	
.....	8
D. Manfaat Penelitian	
.....	9
II. TINJAUAN PUSATKA	
A. Landasan Teori.....	
.....	10
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	
.....	24
C. Kerangka Pikir	29

D. Hipotesis.....	29
-------------------	----

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Metode Analisis Data.....	
.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KKP Pratama Makassar selatan	40
B. Struktur Organisasi KKP Pratama Makassar selatan.....	42
C. Visi dan Misi KKP Pratama Makassar Selatan	46
D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar selatan.....	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

5.1 Kriteria Responden.....	48
5.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	49
5.3 Validasi Instrumen Pertanyaan Tax expo	50
5.4 Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan	51
5.5 Validasi Instrumen Pertanyaan Sosialisasi Pajak.....	52
5.6 Validasi Instrumen Pertanyaan Website Pajak	53
5.7 Validitas Instrumen Pertanyaan Brosur Pajak.....	54
5.8 Validitas Instrumen Pertanyaan Wajib Pajak.....	54
5.9 Variables Entered/RemovedP	57
5.10 Model Summary ^b	58
5.11 ANOVA ^b	59
5.12 Coefficients ^a	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pikir	28
4.1 Struktur Organisasi.....	42
5.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	56
5.2 Scatterplot	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Reability
- Lampiran 4 Uji normalitas
- Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Regresi Linear berganda
- Lampiran 8 Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11 Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 12 SuratPengajuanJudul
- Lampiran 13 Surat Pengangkatan dosen Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajaksesuai yang diberikan pemerintah maka adanya informasi perpajakan masyarakat bisa melihat tata cara membayar pajak sehingga masyarakat tidak cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis di Amerika yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena kurang informasi perpajakan kepada masyarakat tingkat kesadaran

masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak sehingga adanya informasi perpajakan sehingga masyarakat bisa gampang melihat tata cara membayar pajak. Data informasi pajak yang di dapat dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahunan 2016 melalui *e-Filling* sampai batas waktu 31 Maret 2017 ada sebanyak 3,46 juta SPT. Sementara tahun sebelumnya hanya mencapai angka 1,08 juta SPT. Naiknya jumlah WP yang melaporkan SPT secara online tersebut dibarengi dengan penurunan jumlah WP yang melaporkan kewajibannya secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak maupun *drop box* yang disediakan. DJB mencatat SPT yang masih dilaporkan dengan cara konvensional sebanyak 6,21 juta SPT, dibandingkan tahun sebelumnya 6,51 juta SPT, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Adriani, 2014: 03)

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Anggaran penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp. 1.294,3 Triliun atau 67 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sedangkankan untuk tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.360.2

Triliun atau 75 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2017, dan wajib pajak orang pribadi berjumlah 165.957 SPT dan yg baru melapor sekitar 91.839 SPT, artinya ada sekitar 74.118 yang belum bayar pajak pribadi adapun wajib pajak badan berjumlah 57.309 SPT dan yang baru melapor sekitar 30.102 SPT masih ada sekitar 27.207 yang belum bayar pajak badan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rachman, 2010:32) Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Zain, 2008: 43)

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111). Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Ketidapatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Raja Malem Taringan bahwa permasalahan eksternal perpajakan berasal dari Wajib Pajak. Permasalahan eksternal tersebut timbul karena permasalahan internal dan sistem pajak itu sendiri. Pernyataan ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2003 di Pulau Jawa menyebutkan bahwa 41% responden tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkannya akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Darmin Nasution juga melihat bahwa masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut agar Indonesia dapat sebanding dengan Negara lain. Darmin juga tidak mengelak ketika ditanya apakah salah satu faktor yang membuat orang enggan membayar pajak adalah karena manfaatnya kurang begitu dirasakan.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulai *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assessmentsystem*. Dalam *official system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Nampak jelas bahwa *self assessmentsystem*. Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat

Jendral Pajak (Ditjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Menurut Isroah (2012:7), *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sebab masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri. Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undang dalam pasal 23A UUD 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemenkan ketiga kalinya pada tahun 2001) menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang” (LibertiPandiangan, 2014: 64).

Di kota makassar yang jumlah penduduknya mencapai 1.633.418 jiwa dan dengan adanya peraturan tentang penerimaan daerah yang salah satunya adalah kepemilikan dan pembayaran NPWP yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di kota Makassar terkenal , karena perusahaan swasta atau investor asing dengan banyak pengusaha yang kurang peduli dengan

pembayaran pajak tersebut. Banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan untuk menunjang kemajuan kota tersebut. Tidak hanya pengusaha pengusaha saja yang tidak mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP, masih banyak pengusaha Wajib Pajak lainnya yang tidak mendaftarkan dirinya ke Kantor Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus yang memang tidak asing lagi untuk semua masyarakat yaitu Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah pegawai pajak oleh karena itu banyak masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan namun dinikmati oleh oknum-oknum pajak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Wajib Pajak yang paham atas pajaknya yaitu wajib pajak yang mengerti, mengetahui pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban bayak pajaknya. Serta Wajib Pajak yang peduli atas pembangunan dan kemajuan untuk negaranya, sehingga pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. melakukan observasi pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan mengatakan bahwa masih banyak pengusaha yang belum membayar kewajiban pajaknya, serta masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Namun demikian tidaklah mudah menggugah kesadaran masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha asing yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya, karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit-belit, sehingga mereka sudah enggan bertemu dengan pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya. Bahkan ada pengusaha yang malas membayar pajaknya, karena pembayaran pajak dianggap tidak penting, dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya tersebut. Padahal kalau para pengusaha ini berminat untuk membayar pajak atau bahkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, banyak sekali yang akan di dapat dari kepemilikan NPWP, serta dari pembayaran rutin kewajiban pajaknya tersebut. Karena manfaat NPWP menurut Abdul Rahman adalah memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit pada bank, pembuatan Rekening Koran di bank, pengajuan SIUP atau TDP, pembayaran pajak final, pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, kemudahan pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak, bebas dari pengenaan fiskal luar negeri. Dengan demikian hanya pengusaha yang memang taat

membayar pajak saja yang mau mendaftarkan atau mengurus kepemilikan NPWP ini, dan tepat waktu untuk membayar pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya di kota Makassar. Walaupun tidak semua pengusaha mau mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP masih ada beberapa yang memang peduli pada peraturan pajak yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya peraturan pembayaran pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai landasan bagi pemungut pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk tepat membayarkan pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh informasi perpajakan berbasis *social community cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar Selatan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *tax expo*, sosialisasi, website, pajak dan brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor pelayanan Pajak pratama Makassar selatan ?
2. Manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Selatan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *tax expo*, sosialisasi, website, pajak dan brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor pelayanan Pajak pratama Makassar selatan.
2. Untuk mengetahui manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Selatatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berjalan dengan seimbang.

b. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui pelayanan pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Informasi perpajakan berbasis *social community cluster*

a. Pengertian pajak berbasis *social community cluster*

pajak berbasis *social community cluster* adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan. Dan membagi *social community cluster* kedalam dua kelompok, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

b. Pembagian pajak berbasis *social community cluster*

1) Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP)

Menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:Wajib PajakOrang Pribadi(WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

a) Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam

konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.

2).Wajib Pajak Badan (WP badan)

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT/*permanent establishment*). Definisi mengenai 'badan' ini dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Badan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan salah satu subjek pajak. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia disebut dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri. Dan manakala persyaratan subjektif maupun objektifnya telah terpenuhi, Subjek Pajak Badan disebut dengan Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Sedangkan Lembaga atau unit dari pemerintah yang tidak termasuk dalam pengertian badan adalah unit-unit tertentu yang memenuhi seluruh kriteria berikut [Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh]:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembiayaannya bersumber dari APBN (Pusat) atau APBD(Daerah);
 3. Penerimaannya dimasukkandalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah .Pembukuannya diperiksa oleh pengawasan fungsional negara. Kantor perwakilan Negara asing, seperti Kantor Kedutaan negara asing yang adadi Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 3 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 juga ditetapkan bukan sebagai WP Badan. Demikian juga dengan organisasi-organisasi internasional yang ada di Indonesia juga ditetapkan bukan sebagai WP badan dengan syarat:
- c. pajak berbasis *social community cluster* meliputi

1) *Tax expo*

Adalah Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, dan peran penting pajak kepada masyarakat, terutama pada jenjang yang paling dini sebagai pembayar pajak masa depan.

2) Sosialisasi pajak (talk show)

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pajak kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, tetapi melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu menjadi *agent of information* yaitu memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat lain.

3) Website pajak

suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

4) Brosur pajak

tujuan kami adalah pembayaran pajak yang efisien disertai kepatuhan untuk membayar pajak di kantor pajak pratama Makassar selatan terhadap ketentuan yang berlaku ...

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu Dan Sedangkan tujuan wajib pajak adalah di mana uang pembayaran pajak yang di gunakan untuk untuk membangun inspraturktur perkotaan terutama di kota Makassar.

b. Hak dan kewajiban wajib pajak

Tujuan hukum salah satunya adalah keadilan. Begitu juga dengan hukum pajak juga memiliki tujuan sebagaimana tujuan hukum pada

umumnya, yaitu tercapainya keadilan. Dalam hukum pajak, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Di dalam hukum pajak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur wajib pajak dengan kewajiban-kewajibannya, hukum pajak selain itu juga mengatur tentang hak-hak yang dapat dimiliki oleh wajib pajak. Berkaitan dengan pengertian kewajiban wajib pajak.

Rochmat Soemitro mengatakan: Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, wajib pajak dapat menunjukkan atau minta bantuan, atau memberi kuasa kepada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya (*persoonlijk*). Khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap melekat padanya, dan ia tetap bertanggung jawab, walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan

Adapun kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- c. Mengisi dengan benar SPT dan dimasukkan ke kantor pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- e. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak;

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

Sedangkan hak-hak wajib pajak adalah:

1. Mengajukan keberatan dan banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan bayar;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

3. Kepatuhan Pajak

a. pengertian kepatuhan pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010 :138)

Safitri mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (safitri dalam Rahayu, 2010)

Rahmanmengertikan “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Rahman, 2010: 32)

Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111)

b. Bentuk-bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang- undang perpajakan

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Untung Sukardji, Perkembangan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pemungutan PPN. SPT Masa PPN Sebagai Sarana Melakukan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pemungutan PPN Melaksanakan Kewajibannya.

- a) *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/1986 tanggal 27 Maret 1986 sebagai disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN).*
- b) *Ketika Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 ditetapkan tidak berlaku dan dig dengan Keputusan presiden Nomor 56 Tahun 1988*

Menurut WidiWidodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

a. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah

satu faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, system perpajakan, *defference factors*.

b. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan system perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historismelekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatanyang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

c. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

d. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.

- 2) Wajib Pajak wajib membayar kewajiban pajaknya pada Kantor Pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui Wajib Pajak sendiri.
- 3) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah terdaftar pada Kantor Pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Menurut Abdul Rahman (2010:33) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor pajak.

Sony Devano dan SitiKurniaRahayu,(2006: 111) Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwakeriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.

4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, yang menyetorkan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak tidak menunda untuk membayar kewajiban pajak yang terutang pada Kantor Pajak yang berada di daerah masing-masing. Serta wajib Pajak yang bersih dari hukuman karena tindakannya dalam bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010) Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan

mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, (Jatmiko,2006). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (PandapotanRitonga, 2011:15)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengertiperihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

3. Hambatan Pembayaran Pajak

Beberapa alasan Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Lebih banyak memakan waktu untuk melaksanakan peraturan hukumnya daripada peranjang hukum pajak
- b. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan

sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorupsi, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

- c. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak
- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.
- e. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa hambatan pembayaran pajak adalah penegakkan hukum yang kurang, peraturan yang terlalu berbelit-belit sehingga banyak Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajaknya, serta persepsi masyarakat atau Wajib Pajak yang beranggapa bahwa pemerintah menggunakan pajaknya untuk hal yang kurang mensejahterakan rakyatnya atau pemborosan pemakaian pajak untuk hal yang kurang penting.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Harjanti Puspa Arum (2012)

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Hasil penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner serta teknis analisis regresi berganda. Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu metode yang digunakan adalah *simple random sampling*, serta tempat pengambilan data dan responden. Kelebihan dari 26 penelitian ini adalah variabel yang digunakan lebih banyak, serta menggunakan fleksibilitas dan adaptasi

2. Lusiana Dewi (2011)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan mengoperasionalkan satu variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) poin kepatuhan Wajib Pajak yaitu Mendaftarkan Diri, Mengisi Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Batas waktu menyampaikan Surat Tahunan, Penyampaian Surat

Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Pembayaran Pajak terutang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 195 responden (Wajib Pajak) yang dikategorikan sebagai kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 5 (lima) kategori tidak patuh 30 responden atau 15,4%, kurang patuh 58 responden atau 29,7%, cukup patuh 36 responden atau 18,5%, patuh 35 responden atau 17,9% dan sangat patuh 36 responden atau 18,5%. deskriptif kuantitatif Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Dewi adalah adanya 7 (tujuh) poin kepatuhan Wajib Pajak yaitu Mendaftarkan Diri, Mengisi Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Batas waktu menyampaikan SuratPemberitahuan Tahunan, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Pembayaran Pajak Terutang. Kelebihan dari penelitian ini yaitu terdapat 7 poin kepatuhan wajib pajak yang dijabarkan peneliti.Kelemahan dari penelitian ini yaitu hanya mengangkat 1 (satu) variabel.Persamaan dalam peneilitian ini yaitu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian serta beberapa variabel yang dilakukan peneliti sebelumnya.

3. Cindy Jotopurnomo dan YenniMangoting (2013)

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Perbedaan pada penelitian ini adalah tempat dan waktu saat melakukan penelitian tersebut serta variabel Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak berada. Persamaan dari penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Fiskus untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak serta sama-sama menggunakan kuesioner.

4 .Sri Putri TitaMutia (2014)

Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun semakin tinggi.
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib pajak semakin tinggi.
- c. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.
- d. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin

tinggi. Kelebihan penelitian ini yaitu menjelaskan lebih dari dua variabel yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kelemahan pada penelitian ini kuesioner yang digunakan masih terlalu umum, belum menjurus pada variabel. Persamaan dari penelitian ini yaitu pengumpulan data dari responden yaitu menggunakan kuesioner dan teknik analisis data.

Tabel .Mapping jurnal penelitian terdahulu

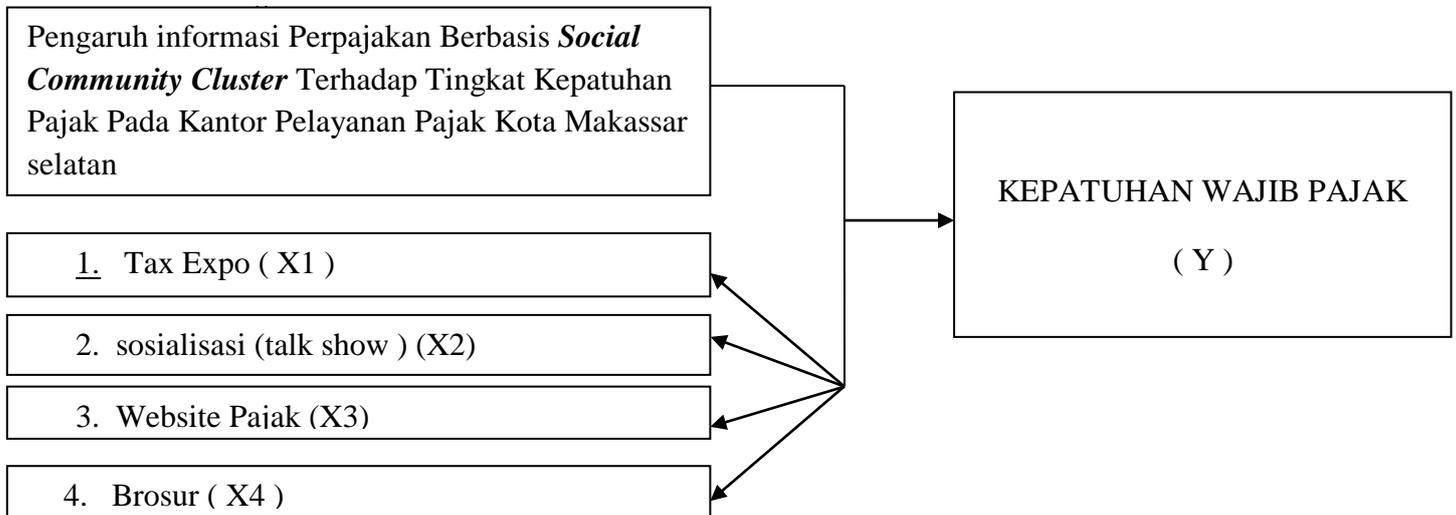
Tabel. 1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Metode penelitian variabel	Kesimpulan
1.	Bayu Cakoro dan Heru Susilo (2013)	pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak	Pengambilan sampel dengan teknik acak stratifikasi, analisis menggunakan regresi linear dan uji asumsi klasik	Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa ketiga variabel bebas yang diujikan antara lain pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara variabel terikat (motivasi wajib pajak)
2.	Asih dan Salman (2014)	Studi kepatuhan wajib pajak dari aspek pengetahuan, persepsi, dan system	metode kuantitatif	pihak direktorat jendral pajak sebagai sumber informasi perpajakan yang utama untuk

		administrasi.		senantiasa memberikan informasi terbaru pajak secara tepat waktu dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak.
3.	Irmayanti dan mildawati (2015)	Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Teknik analisis data menggunakan data primer dan menggunakan survey lapangan menggunakan kuisisioner	Modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi tidak mampu digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Septiyani Nur Khasanah	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Metode regresi linear	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pikir

Setiap penelitian pasti di perlukan adanya kerangka pikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian,



Gambar : 2.1 Kerangka pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian

1. Diduga bahwa informasiperpajakan berbasis *social community cluister* berupa *tax expo* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan
2. Diduga bahwa informasiperpajakan berbasis *social community cluister* berupa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan

3. Diduga bahwa informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *website* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan
4. Diduga bahwa informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini rencana akan dimulai bulan april sampai mei 2017. Penelitian ini berlangsung di kantor pajak kota Makassar selatan. Penelitian ini dilakukan karena untuk melihat Pengaruh Informasi Perpajakan Berbasis *social community cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

B. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dan sedangkan kuantitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi kelapangan. Menggambarkan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi maupun dokumentasi dan studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian yang akan di gunakan terdiri dari atas data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, kuesioner diambil dari penelitian

sebelumnya yang telah teruji. Instrumen dalam kuesioner partisipasi Dalam penelitian ini merupakan data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Pajak Berbasis *social Community Cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

2. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa kegiatan di kantor pajak yaitu *tax expo*, sosialisasi, website dan brosur apakah ketika 4 poin itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak lebih giat dan tidak malas lagi untuk membayar pajak terutama di kantor pajak pratama Makassar selatan, jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik ini yang akan digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya yang tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang di gunakan dan kemampuan tertentu dalam peneliti.

- a. Dokumentasi adalah Melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan *tax expo*, sosialisasi . website pajak dan brosur dan dari situlah kita mengambil data yang ingin kita teliti lebih jauh dan di lakukan di kantor pajak pratamamakassar selatan
- b. Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Tentang Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Pajak Berbasis *Social Community Cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi (Sugiyono, 2012; 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 500 Wajib Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan

2. Sampel

Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan. Menentukan ukuran sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2008) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + (500) \cdot (0,01)^2}$$

$$n = 70 \text{ Responden}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Prosentase (%), toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Analisis Regresi berganda

Metode analisis data yang digunakan

adalah regresi berganda. Disamping itu, model analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang ada.

Metode persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi:

$$Y = a + Bx_1 + Bx_2 + Bx_3 + Bx_4 + e$$

Keterangan

- Y : Kepatuhan Pajak
 a : Konstan
 bx1 : Tax Expo
 bx2 : Sosialisasi
 bx3 : Websait Pajak
 bx4 : Brosur
 e : standar eror (tingkat kesalahan)

penilaian dilakukan dengan berdasarkan skala berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (SS)
 2. Tidak Setuju (TS)
 3. Setuju (S)
 4. sangat setuju (SS)
2. Uji Kulaitas Data
 - a. Uji Validitas

"Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat Validitas atau kesahitan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya" (Sugiyono, 2004:105) kriteria pengujian validitas hadala sebagai berikut:

- 1) Jika r hiding positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid

2) Jika r hitung negatif dan r hitung $< r^t$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliability

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibelakan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ujinormalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitiannya menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara pengamatan satu dan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dideteksi ada tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pola tertentu yang timbul teratur menunjukkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Untuk memperkuat uji scatterplot terdapat cara lain yaitu dengan pengujian statistik uji park. Apabila variabel independen memiliki tingkat signifikasinya melebihi 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*) Koefisiendeterminasi (*Adjusted R2*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).
- b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik) Dari ke 4 variabel independen (variabel bx_1) yang dimasukkan dalam regresi memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Jika nilai t-hitung (bx_2) $> (+)$ t-tabel atau t-hitung $(-) < (-)$ t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dimana kriteria penerimaan dan penolakan H_0 adalah :

- H_0 ditolak jika t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel
- H_0 diterima jika t-hitung (+) < (-) t-tabel atau t-hitung (-) > (-) t-tabel

DAFTAR PUSTAKA

- Bery. 2010. *pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Bukittinggi*
- Budi leksmana Antariksa, 2001 “ *pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Irmayani R dan Mildawati T, 2015 “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Isroah.(2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Jatmiko, NugrohoAgus (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca
- PandianganLiberti (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta.: Erlangga
- RahayuSitiKurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman Abdul. (2010). *AdministrasiPerpajakan*.Bandung: Nuansa.
PJ A. Adriani. (2013). *Konsep Dasar Perpjakan*. Bandung:
- Rahmawatidkk, 2014 “ *pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Surakarta*” Universita Sebelas Maret, Surakarta.
- Resmi Siti .(2011). *Perpajakan*.Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Sugiyono (2012).*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta.
- SuhendraEupharasia Suzy,2010 “ *pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan*” Universitas Gunadarma
- zain Mohammad. 2012. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaSukoharjo*.Skripsi.

BAB IV

GAMABARAN UMUN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

Sampai akhir 2016, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 9 kepala seksi, 18 *account representative*, 1 bendahara, 2 sekretaris, 2 *operator console*, 2 jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegndalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

3. Bagian Kepegaiwaan

Bertugas melaksanakan urusan kepewaiian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan atau penyusunan arsip dan

dokumen.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah :

- a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b) Perubahan identitas WP.
- c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.
- d) Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.

f) Penerbitan SKP.

g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian

bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun

penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KKP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KKP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KKP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KKP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

^Berdasarkan penggunaan lahan, hanya sekitar 49% lahan di wilayah kerja KKP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah dan kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang banyak

berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal ini berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakkukang, Makassar, dan Rappocini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Responden

Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner yang dilakukan Pada tanggal 21 Juli 2017 sampai 27 juli 2017 dan kuesioner yang kembali sebanyak 70 kuesioner artinya persentase tingkat pengembalian kuesioner sebesar 70%. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat (warga sipil). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.1
Kriteria Responden

Kriteria	Jumlah	Persentase
Janis kelamin :		
- Laki-laki	40	57.2%
- Perempuan	30	42.8%
Tingkat Pendidikan		
- SMP	10	14.3%
- SMA	18	25.7%
- S1 (Strata Satu)	25	35.7%
- S2(Magister)	17	24.3%

Berdasarkan tabel 5.1 diatas maka jumlah responden paling banyak adalah responden laki-laki yaitu responden (57,2%), sedangkan responden perempuan yaitu responden (42,8%).

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dari 70 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian responden memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 25

responden (37,5 %), diikuti 18 responden dengan tingkat pendidikan SMA (25,7%), sebanyak 17 responden dengan tingkat pendidikan S2 (24,3%), dan 10 responden dengan tingkat pendidikan SMP (14,3%).

2. Analisis Statistik

a. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (Tax Expo, Sosialisasi Pajak, Website Pajak, Brosur Pajak, dan Wajib Pajak), peneliti menggunakan tabel deskriptif yang tersaji pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.2
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tax expo	70	9	15	884	12.63	1.310	1.715
Sosialisasi pajak	70	9	19	1082	15.46	2.090	4.368
Websit pajak	70	14	20	1158	16.54	1.742	3.034
Brosur pajak	70	10	15	880	12.57	1.303	1.698
Wajib pajak	70	13	20	1191	17.01	1.952	3.811
Valid N (listwise)	70						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 70 responden maka hasil pengukuran variabel tax expomempunyai total jawaban seluruhnya berjumlah 884 dengan jawaban terendah 9 dan jawaban tertinggi 15, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 12.63 dengan standar deviasi 1.310.

Hasil pengukuran variabel sosialisasi pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1082 dengan jawaban terendah 9 dan jawaban tertinggi 19, sehingga diperoleh skor jawaban responden

mempunyai rata-rata 15.46 dengan standar deviasi 2.090.

Hasil pengukuran variabel website pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1158 dengan jawaban terendah 6 dan jawaban tertinggi 14, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 16.54 dengan standar deviasi 1.742.

Hasil pengukuran variabel brosur pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 880 dengan jawaban terendah 5 dan jawaban tertinggi 10, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 12.57 dengan standar deviasi 1.303.

Hasil pengukuran variabel wajib pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1191 dengan jawaban terendah 13 dan jawaban tertinggi 20, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 17.01 dengan standar deviasi 1.952.

b. Hasil Uji Kualitas Data

Ada dua prosedur yang dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas, yaitu:

Uji validitas dilakukan dengan melihat “korelasi antara skor butir dengan skor faktor hams berkorelasi positif, kemudian membandingkan r tabel dengan r hitung dari tiap butir pertanyaan pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $(n-k)$ ” (Santoso, 2000:41). Secara rinci hasil uji reliabilitas dan validitas disajikan pada lampiran 4 dan 5.

Tabel 5.3
Validitas Instrumen Pertanyaan Tax Expo

Item	<i>Corrected item total correation</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.489	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.398	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.249	0,244	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari hasil output *reliability* variabel tax expo pada lampiran tersebut, menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran adalah reliabel dengan *cronbach alpa* 0,860, yang berarti bahwa $0,860 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ketiga butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi dari masing-masing butir, yang dilanjutkan dengan mean dan standar deviasi untuk ketiga butir tersebut, yaitu 12.63 dan 1.310.

Tabel 5.4
Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Status
1.	Tax Expo (X_1)	0.860	Reliabel
2.	Sosialisasi Pajak (X_2)	0.625	Reliabel
3.	Website Pajak (X_3)	0.625	Reliabel
4.	Brosur Pajak (X_4)	0.739	Reliabel
5.	Wajib Pajak (Y)	0.723	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Kolom *Corrected Item Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan r_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan. Pada signifikansi 5% dengan derajat bebas $df = 63$, jumlah (kasus - k), r_{tabel} sebesar 0,244. Berdasarkan gambar pada tabel 5.3 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel Sosialisasi Pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan cronbach alpha adalah 0,625 yang berarti $0,625 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke empat butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 15.46 dan 2.090.

Tabel 5.5
Validitas Instrumen Pertanyaan Sosialisasi Pajak

Item	<i>Corrected item total correlation</i> (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	.278	0,244	Valid
Pertanyaan 2	.690	0,244	Valid
Pertanyaan 3	.449	0,244	Valid
Pertanyaan 4	.370	0,244	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (datadiolah)

Selanjutnya, output *reliability* menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel sosialisasi pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.5 terlihat bahwa hasil

uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel website pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan cronbach alpha adalah 0.625 yang berarti $0,625 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke empat butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 16.54 dan 1.742.

Tabel 5.6
Validitas Instrumen Pertanyaan Website Pajak

Item	<i>Corrected item total correlation</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.332	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.645	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.598	0,244	Valid
Pertanyaan 4	0.541	0,244	Valid
Pernyataan 5	0.266	0,244	Valid
Pernyataan 6	0.398	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel website pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.5 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel brosur pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.739 yang berarti $0,739 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke tiga butir pertanyaan yang

mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 12.27 dan 1.303.

Tabel 5.7
Validitas Instrumen Pertanyaan Brosur Pajak

Item	<i>Corrected item total correction</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.372	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.515	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.694	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel brosur pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.6 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel wajib pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.723 yang berarti $0,723 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke enam butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 17.01 dan 1.952.

Tabel 5.8
Validitas Instrumen Pertanyaan Wajib Pajak

Item	<i>Corrected item total correction</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.332	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.645	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.598	0,244	Valid
Pertanyaan 4	0.541	0,244	Valid
Pernyataan 5	.266	0,244	Valid
Pernyataan 6	.398	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel website pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.6 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

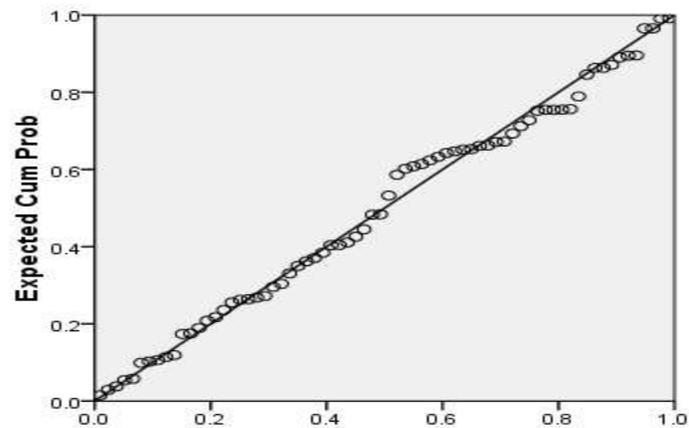
c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

Pada penelitian ini hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal,serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan *budgetary slack* berdasarkan masukan variabel independennya yaitu partisipasi anggaran dan informasi asimetri.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Wajib Pajak**

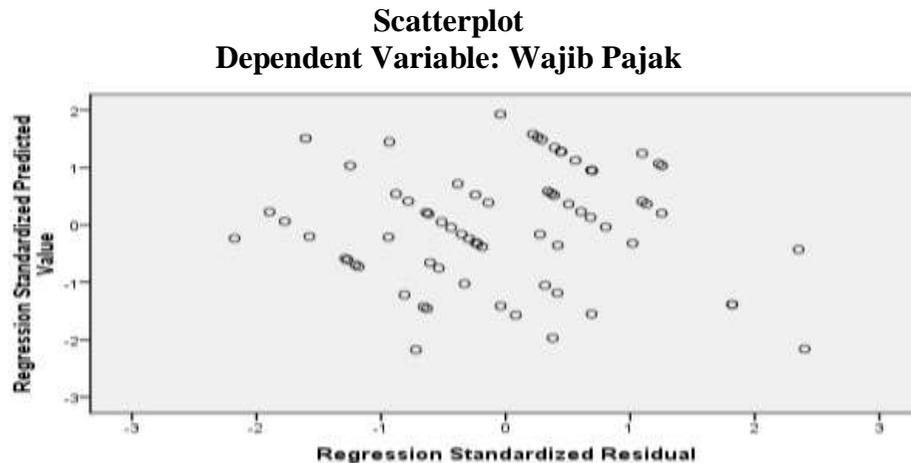


Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SREISD dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

- a) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari grafik *Scatterplot* dan *Partial Regression Plot* penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (lampiran 4), sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi wajib pajak berdasarkan masukan variabel independennya (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak).

d. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji R (Determinan)

Berdasarkan hasil olahan SPSS, maka di bawah ini adalah hasil output

SPSS 20:

Tabel 5.9
Variables Entered/Removed^P

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Brosur_Pajak, Tex_Expo, Sosialisasi_Pajak, Website_Pajak ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5.9 *variables Entered Removed* menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak.
- b. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (*removed*).
- c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter.

Tabel 5.10
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.874	.807	3.421

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2007 (data diolah)

Dari tabel model summary di atas dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,911 yang berarti bahwa hubungan antara tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak dengan wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 91.1%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,874. Yang berarti bahwa variabel dependen (wajib pajak) mampu dijelaskan oleh variabel independent (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak dan website pajak) sebesar 87,4%, dan selebihnya 12,6% (100% - 87,4%) dapat dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,807 atau 80,7% pengaruh independen terhadap dependen..

2. Uji F (Simultan)

Berdasarkan analisis SPSS 20 maka diperoleh output sebagai berikut

Tabel 5.11
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.043	4	24.761	9.706	.000 ^a
	Residual	165.828	65	2.551		
	Total	264.871	69			

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung > F tabel yaitu $9.706 > 2,51$. Kemudian taraf signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) kurang dari 0,05, maka model regresi berganda bisa dipakai untuk memprediksi tingkat wajib pajak. Atau bisa dikatakan bahwa tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak berpengaruh terhadap wajib pajak.

3. Uji t (Individual)

Berdasarkan hasil analisis SPSS 20, maka diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 5.12
Coefficients³

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.416	3.461		4.499	.000
TEX_EXPO	.271	.152	.182	2.982	.004
SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	3.216	.002
WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.11 pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.416 + 0.271X_1 + 0.358X_2 + 0.386X_3 + 0.431X_4$$

Konstanta sebesar 4,416 menyatakan bahwa jika tidak ada tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak, maka kinerja manajerial adalah sebesar 15.862.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.11, diperoleh t

1. Tax expo berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung 2.982 > t tabel 1.997
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung 3.216 > t tabel 1.997
3. Website pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung 3.390 > t tabel 1.997
4. Brosur pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak karena nilai t hitung $3.060 > t$ tabel 1.997

Dengan demikian hasil peneliti menerima hipotesis pada uji F , yang berarti tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian pada uji t hipotesis dapat sepenuhnya diterima karena semua variabel independen mempunyai angka profitabilitas jauh lebih kecil dari $0,05$.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa masing-masing variabel yang diikutsertakan dalam penelitian ini telah memenuhi kualitas yang baik, yaitu valid dan reliabel. Selain itu semua variabel terbebas dari asumsi klasik sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas data yang baik.

1. Dalam uji hipotesis yang pertama (H_1) tentang Tax expo berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t -hitung variabel tax expo adalah sebesar $2,982$, dengan nilai signifikan sebesar $0,004$ sedangkan nilai t -tabel $1,997$, sehingga t -hitung $>$ t -tabel ($2,982 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa tax expo (X_1) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Salman (2011) dengan judul “ studi kepatuhan wajib pajak dari aspek pengetahuan, persepsi, dan sistem administrasi. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh

direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community cluster* merupakan salah satu cara yang digunakan direktorat jendral pajak untuk memberikan informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak badan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Dalam uji hipotesis yang kedua (H_2) tentang sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel sosialisasi pajak adalah sebesar 3,216, dengan nilai signifikan sebesar 0,002 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,216 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima, dan membuktikan bahwa sosialisasi pajak (X_2) secara statistic berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan Cakoro dan susilo (2015) dengan judul “ pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community clusters* salah satunya yaitu sosialisasi pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak.

3. Dalam uji hipotesis yang ketiga (H₃) tentang Website Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel Website Pajak adalah sebesar 3,390, dengan nilai signifikan sebesar 0,004 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga t-hitung > t-tabel (3,390 > 1,997). Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, dan membuktikan bahwa Website Pajak (X₃) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwadengan adanya informasi perpajakan seperti website pajak dapat dilihat di (www.pajak.go.id) maka wajib pajak akan lebih mudah memperoleh informasi perpajakan dan informasi tersebut dapat diakses kapan saja. Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) dengan judul “Pengaruhpengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community clustery* yaitu website pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
4. Dalam uji hipotesis yang ke empat (H₄) tentang brosur pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel Website Pajak adalah sebesar 3,066, dengan nilai signifikan sebesar 0,004 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga t-hitung > t-tabel ($3,066 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa Website Pajak (X_4) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya informasi perpajakan seperti brosur pajak akan memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada wajib pajak tentang informasi perpajakan, dengan adanya brosur pajak maka wajib pajak akan mengetahui informasi terbaru mengenai perpajakan. Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti dan mildawati (2015) dengan judul “ Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community cluster* yaitu brosur pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan lima maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linear berganda, diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak terhadap wajib pajak dengan arah positif, artinya semakin tinggi informasi perpajakan berbasis *social community* berupa *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan.
2. Dari hasil penelitian dan olah data yang dilakukan dari keempat variabel independen yaitu *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak dan website pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah variabel website pajak terlihat dari hasil uji t yang dilakukan nilai konstanta variabel website pajak jauh dibawah 0,05 yaitu 0,001.

B. Saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan justifikasi bagi kepentingan praktis, dalam rangka peningkatan wajib pajak di Makassar. Berikut ini beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan keterbatasan antara lain:

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan untuk menghindari bias responden atau rendahnya *reposisi rate*, maka sebaiknya diusahakan menggunakan metode observasi (pengamatan) langsung kepada objek atau metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.
2. Memperluas lingkup penelitian (wilayah penelitian), memperbanyak sampel dan pemilihan sampel yang acak, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan
3. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun variabel moderating, karena peningkatan wajib pajak di Makassar tidak hanya diukur dari pengaruh penerapan berbasis social community cluster (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak dan wajib pajak).
4. Untuk kantor pajak pratama makassar selatan buat pegawainya yang di bagian tempat bayar pajak agar selalu tersenyum kita ada orang yang ingin bayar pajak.

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif

NIM : 105730 4310 13

Jurusan : Akuntansi

mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL COMUNITY CLUSTER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN”**.

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan, yang biasanya diwakili oleh staf / ahli pajak. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan bapak / ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.

Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu saya mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner. Saya menjamin kerahasiaan dari semua pendapat / opini / jawaban yang bapak / ibu berikan dalam kuesioner terlampir sesuai dengan etika penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

ARIF

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha : Perdagangan Industri
 Jasa Lain-lain

IDENTITAS RESPONDEN

Beritanda (X) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara

3. Nama :
4. Umur : <25 25-35
 36-55 >55
5. Jenis Kelamin : Pria Wanita
6. Pendidikan Terakhir : S3 S2 S1 D3 Lainnya
7. Lama Bekerja : < 1 Tahun
 Antara 1-5 tahun
 Antara 6-10 tahun
 > 10 Tahun
8. Pengetahuan Pajak : Brevet Penyuluh Pajak
 Tidak Ada Lainnya

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut:

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Kurang Setuju (KS)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

Catatan :Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PERNYATAAN
Penilaian Variabel-variabel Penelitian

A. Tax Expo (X1)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	<i>Tax Expo</i> dapat memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak					
2.	Adanya Account Representative dan <i>tax expo</i> yang diadakan DJP benar-benar membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>tax expo</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					

B. Sosialisasi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan serta rutin melakukan pemeriksaan					
2.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak					
3.	Wajib Pajak senang jika dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP					
4.	SDM yang melakukan sosialisasi Direktorat Pajak telah memiliki keahlian yang kompeten terutama di bidang perpajakan dan mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak					

C. Website Pajak (X3)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	System administrasi modern (digitalisasi: e-SPT, e-filing) sudah Benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan					
2.	Pembayaran secara on-line (teller-bank, interner banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak kerana prosesnya cepat					
3.	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang diakses melalui situs pajak					
4.	<i>Complain Center</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					

D. Variabel Brosur Pajak (X4)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib Pajak akan dimudahkan jika DJP membuat brosur pajak lengkap didampingi dengan AR					
2.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dlaam Brosur Pajak					
3.	Brosur pajak sebaiknya dobagikan kepada seua wajib pajak yang disertai dengan penjelasan dari petugas Pajak					

E. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela pada Direktorat Jendral Pajak dikukuhkan sebagai PKP					
2.	Wajib Pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu					
3.	Wajib Pajak menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum					

	batas akhir penyampaian SPT					
4.	Wajib Pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
5.	Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan					
6.	Wajib pajak telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan					

LAMPIRAN 1

TABULASI HASIL KUESIONER TEX EXPO

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
1	5	4	5	14
2	3	3	3	9
3	4	4	5	13
4	5	5	5	15
5	4	5	4	13
6	5	4	4	13
7	5	5	5	15
8	5	5	4	14
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	4	4	4	12
12	5	4	4	13
13	5	4	4	13
14	5	5	4	14
15	4	4	4	12
16	5	5	4	14
17	4	5	5	14
18	4	2	5	11
19	4	3	4	11
20	3	4	4	11
21	4	4	4	12
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	4	4	5	13
26	4	4	5	13
27	4	4	4	12
28	3	4	4	11
29	5	4	5	14
30	5	5	5	15
31	4	5	4	13
32	4	4	4	12
33	5	4	5	14
34	5	4	4	13
35	4	4	3	11
36	4	4	4	12
37	5	5	5	15

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
38	4	4	5	13
39	4	4	4	12
40	5	5	4	14
41	4	4	3	11
42	5	4	3	12
43	4	4	4	12
44	4	4	4	12
45	4	4	4	12
46	3	3	3	9
47	4	4	5	13
48	5	5	5	15
49	4	5	4	13
50	5	4	4	13
51	5	5	5	15
52	5	5	4	14
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	4	4	4	12
56	5	4	4	13
57	5	4	4	13
58	5	5	4	14
59	4	4	4	12
60	5	5	4	14
61	4	5	5	14
62	4	2	5	11
63	4	3	4	11
64	3	4	4	11
65	4	4	4	12
66	4	4	4	12
67	4	4	4	12
68	4	4	4	12
69	4	4	5	13
70	4	4	5	13

TABULASI HASIL KUESIONER SOSIALISASI PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
1	4	3	3	3	13
2	4	3	3	4	14
3	3	4	4	4	15
4	3	3	4	3	13
5	3	3	4	4	14
6	3	3	4	4	14
7	3	3	3	4	13
8	5	4	5	5	19
9	5	1	1	2	9
10	3	3	5	4	15
11	4	4	5	3	16
12	4	4	5	3	16
13	5	4	4	4	17
14	3	3	4	4	14
15	3	4	4	4	15
16	3	4	4	4	15
17	5	5	4	3	17
18	3	4	4	4	15
19	4	5	4	4	17
20	5	5	4	5	19
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	4	19
23	4	4	4	4	16
24	4	4	5	4	17
25	4	4	4	4	16
26	3	3	4	4	14
27	3	4	5	4	16
28	2	4	2	4	12
29	4	4	5	3	16
30	4	4	4	4	16
31	3	3	3	4	13
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	3	3	4	4	14
36	4	4	5	4	17
37	5	5	4	4	18
38	5	4	5	5	19

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
39	4	5	5	5	19
40	4	4	4	4	16
41	3	3	4	4	14
42	4	4	4	4	16
43	5	4	3	5	17
44	4	3	4	4	15
45	4	3	3	3	13
46	4	3	3	4	14
47	3	4	4	4	15
48	3	3	4	3	13
49	3	3	4	4	14
50	3	3	4	4	14
51	3	3	3	4	13
52	5	4	5	5	19
53	5	1	1	2	9
54	3	3	5	4	15
55	4	4	5	3	16
56	4	4	5	3	16
57	5	4	4	4	17
58	3	3	4	4	14
59	3	4	4	4	15
60	3	4	4	4	15
61	5	5	4	3	17
62	3	4	4	4	15
63	4	5	4	4	17
64	5	5	4	5	19
65	4	4	4	4	16
66	5	5	5	4	19
67	4	4	4	4	16
68	4	4	5	4	17
69	4	4	4	4	16
70	3	3	4	4	14

TABULASI HASIL KUESIONER WEBSITE PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
1	4	3	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	3	4	4	4	15
4	3	4	3	4	14
5	5	5	5	4	19
6	5	5	5	5	20
7	4	5	4	5	18
8	5	5	4	4	18
9	4	5	4	4	17
10	3	4	4	4	15
11	4	5	5	4	18
12	4	5	5	5	19
13	4	4	4	3	15
14	4	4	4	3	15
15	4	4	4	3	15
16	5	4	3	4	16
17	4	5	5	2	16
18	3	5	4	4	16
19	3	4	4	4	15
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	4	5	5	5	19
24	4	4	5	4	17
25	4	5	5	5	19
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	4	16
28	5	4	4	4	17
29	2	4	4	4	14
30	5	5	4	2	16
31	4	5	4	4	17
32	5	5	4	4	18
33	5	4	4	5	18
34	2	4	4	4	14
35	3	4	3	4	14
36	4	3	4	4	15
37	4	4	4	4	16
38	3	4	4	4	15

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
39	3	4	3	4	14
40	5	5	5	4	19
41	5	5	5	5	20
42	4	5	4	5	18
43	5	5	4	4	18
44	4	5	4	4	17
45	3	4	4	4	15
46	4	5	5	4	18
47	4	5	5	5	19
48	4	4	4	3	15
49	4	4	4	3	15
50	4	4	4	3	15
51	5	4	3	4	16
52	4	5	5	2	16
53	3	5	4	4	16
54	3	4	4	4	15
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	5	5	5	19
59	4	4	5	4	17
60	4	5	5	5	19
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	5	4	4	4	17
64	2	4	4	4	14
65	5	5	4	2	16
66	4	5	4	4	17
67	5	5	4	4	18
68	5	4	4	5	18
69	2	4	4	4	14
70	3	4	3	4	14

TABULASI HASIL KUESIONER BROSUR PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
1	4	4	4	12
2	4	4	4	12
3	4	4	5	13
4	4	4	4	12
5	5	4	4	13
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	5	4	4	13
9	3	4	3	10
10	5	4	4	13
11	4	5	5	14
12	4	4	4	12
13	4	5	5	14
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	3	4	11
19	5	5	5	15
20	4	3	4	11
21	4	3	3	10
22	5	4	4	13
23	4	4	4	12
24	5	5	5	15
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	4	4	5	13
29	5	4	5	14
30	5	5	5	15
31	5	4	5	14
32	5	3	4	12
33	3	4	4	11
34	5	4	4	13
35	4	4	4	12
36	4	4	4	12
37	4	4	4	12
38	4	4	5	13

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
39	4	4	4	12
40	5	4	4	13
41	4	4	4	12
42	4	4	4	12
43	5	4	4	13
44	3	4	3	10
45	5	4	4	13
46	4	5	5	14
47	4	4	4	12
48	4	5	5	14
49	4	4	4	12
50	4	4	4	12
51	4	4	4	12
52	4	4	4	12
53	4	3	4	11
54	5	5	5	15
55	4	3	4	11
56	4	3	3	10
57	5	4	4	13
58	4	4	4	12
59	5	5	5	15
60	5	5	5	15
61	4	4	4	12
62	4	4	4	12
63	4	4	5	13
64	5	4	5	14
65	5	5	5	15
66	5	4	5	14
67	5	3	4	12
68	3	4	4	11
69	5	4	4	13
70	4	4	4	12

TABULASI HASIL KUESIONER WAJIB PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	JUMLAH
1	4	3	3	4	5	5	14
2	4	4	4	3	4	4	15
3	4	4	4	3	4	5	15
4	4	4	5	4	4	5	17
5	5	5	5	4	4	4	19
6	5	5	5	5	5	5	20
7	4	5	5	5	5	4	19
8	4	4	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	5	4	16
10	5	5	4	3	3	5	17
11	5	5	5	4	5	5	19
12	5	5	5	4	5	5	19
13	5	4	4	5	5	4	18
14	5	5	4	4	4	4	18
15	5	4	4	5	5	4	18
16	4	4	4	4	3	5	16
17	4	2	4	4	5	2	14
18	3	4	4	2	5	3	13
19	4	4	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	4	4	16
22	5	4	5	4	4	4	18
23	4	5	5	5	5	4	19
24	4	4	4	4	4	5	16
25	4	5	5	5	5	5	19
26	4	3	4	3	3	3	14
27	4	3	4	3	4	4	14
28	3	4	4	5	5	4	16
29	5	4	4	4	3	4	17
30	5	5	5	5	5	5	20
31	4	4	5	5	5	4	18
32	5	4	3	4	3	4	16
33	5	5	5	4	4	4	19
34	5	5	5	5	5	5	20
35	5	5	4	4	4	4	18
36	5	5	5	4	4	4	19
37	4	3	3	4	5	5	14
38	4	4	4	3	4	4	15

NO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	JUMLAH
39	4	4	4	3	4	5	15
40	4	4	5	4	4	5	17
41	5	5	5	4	4	4	19
42	5	5	5	5	5	5	20
43	4	5	5	5	5	4	19
44	4	4	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	5	4	16
46	5	5	4	3	3	5	17
47	5	5	5	4	5	5	19
48	5	5	5	4	5	5	19
49	5	4	4	5	5	4	18
50	5	5	4	4	4	4	18
51	5	4	4	5	5	4	18
52	4	4	4	4	3	5	16
53	4	2	4	4	5	2	14
54	3	4	4	2	5	3	13
55	4	4	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	4	4	16
58	5	4	5	4	4	4	18
59	4	5	5	5	5	4	19
60	4	4	4	4	4	5	16
61	4	5	5	5	5	5	19
62	4	3	4	3	3	3	14
63	4	3	4	3	4	4	14
64	3	4	4	5	5	4	16
65	5	4	4	4	3	4	17
66	5	5	5	5	5	5	20
67	4	4	5	5	5	4	18
68	5	4	3	4	3	4	16
69	5	5	5	4	4	4	19
70	5	5	5	5	5	5	20

LAMPIRAN 2

REABILITY TAX EXPO

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.860	.857	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.27	.588	70
ITEM_2	4.14	.643	70
ITEM_3	4.21	.562	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	1.000	.471	.260
ITEM_2	.471	1.000	.155
ITEM_3	.260	.155	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	.346	.178	.086
ITEM_2	.178	.414	.056
ITEM_3	.086	.056	.316

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.210	4.143	4.271	.129	1.031	.004	3
Item Variances	.358	.316	.414	.098	1.311	.003	3
Inter-Item Covariances	.107	.056	.178	.122	3.185	.003	3
Inter-Item Correlations	.295	.155	.471	.316	3.045	.021	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	8.36	.842	.489	.258	.266
ITEM_2	8.49	.833	.398	.223	.413
ITEM_3	8.41	1.116	.249	.069	.638

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.63	1.715	1.310	3

REABILITY SOSIALISASI PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.625	.625	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	3.81	.786	70
ITEM_2	3.74	.811	70
ITEM_3	4.01	.825	70
ITEM_4	3.89	.603	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4
ITEM_1	1.000	.333	.049	.016
ITEM_2	.333	1.000	.569	.443
ITEM_3	.049	.569	1.000	.353
ITEM_4	.016	.443	.353	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4
ITEM_1	.617	.212	.032	.007
ITEM_2	.212	.658	.381	.217
ITEM_3	.032	.381	.681	.176
ITEM_4	.007	.217	.176	.364

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.864	3.743	4.014	.271	1.073	.013	4
Item Variances	.580	.364	.681	.317	1.873	.021	4
Inter-Item Covariances	.171	.007	.381	.373	51.056	.017	4
Inter-Item Correlations	.294	.016	.569	.553	36.142	.044	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	11.64	3.247	.278	.156	.714
ITEM_2	11.71	2.091	.690	.484	.308
ITEM_3	11.44	2.511	.449	.354	.521
ITEM_4	11.57	3.205	.370	.226	.585

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.46	4.368	2.090	4

REABILITY WEBSITE PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.725	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.37	.594	70
ITEM_2	4.23	.726	70
ITEM_3	4.33	.583	70
ITEM_4	4.09	.737	70
ITEM_5	4.31	.713	70
ITEM_6	4.23	.685	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	1.000	.473	.270	.257	-.143	.287
ITEM_2	.473	1.000	.608	.342	.139	.535
ITEM_3	.270	.608	1.000	.406	.376	.245
ITEM_4	.257	.342	.406	1.000	.499	.248
ITEM_5	-.143	.139	.376	.499	1.000	.029
ITEM_6	.287	.535	.245	.248	.029	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	.353	.204	.094	.113	-.060	.117
ITEM_2	.204	.527	.257	.183	.072	.266
ITEM_3	.094	.257	.340	.174	.156	.098
ITEM_4	.113	.183	.174	.543	.263	.125
ITEM_5	-.060	.072	.156	.263	.508	.014
ITEM_6	.117	.266	.098	.125	.014	.469

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.260	4.086	4.371	.286	1.070	.010	6
Item Variances	.457	.340	.543	.204	1.599	.008	6
Inter-Item Covariances	.138	-.060	.266	.326	-4.397	.008	6
Inter-Item Correlations	.305	-.143	.608	.751	-4.259	.037	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	21.19	5.603	.332	.323	.717
ITEM_2	21.33	4.398	.645	.582	.621
ITEM_3	21.23	4.990	.598	.471	.649
ITEM_4	21.47	4.630	.541	.391	.657
ITEM_5	21.24	5.491	.266	.393	.742
ITEM_6	21.33	5.180	.398	.310	.702

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.56	6.888	2.624	6

REABILITY BROSUR PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.701	.704	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.29	.568	70
ITEM_2	4.06	.535	70
ITEM_3	4.23	.543	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	1.000	.231	.443
ITEM_2	.231	1.000	.652
ITEM_3	.443	.652	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	.323	.070	.137
ITEM_2	.070	.287	.190
ITEM_3	.137	.190	.295

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.190	4.057	4.286	.229	1.056	.014	3
Item Variances	.301	.287	.323	.036	1.127	.000	3
Inter-Item Covariances	.132	.070	.190	.119	2.694	.003	3
Inter-Item Correlations	.442	.231	.652	.421	2.820	.035	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	8.29	.961	.372	.202	.790
ITEM_2	8.51	.891	.515	.430	.613
ITEM_3	8.34	.750	.694	.516	.375

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.57	1.698	1.303	3

REABILITY WAJIB PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.725	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.37	.594	70
ITEM_2	4.23	.726	70
ITEM_3	4.33	.583	70
ITEM_4	4.09	.737	70
ITEM_5	4.31	.713	70
ITEM_6	4.23	.685	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	1.000	.473	.270	.257	-.143	.287
ITEM_2	.473	1.000	.608	.342	.139	.535
ITEM_3	.270	.608	1.000	.406	.376	.245
ITEM_4	.257	.342	.406	1.000	.499	.248
ITEM_5	-.143	.139	.376	.499	1.000	.029
ITEM_6	.287	.535	.245	.248	.029	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	.353	.204	.094	.113	-.060	.117
ITEM_2	.204	.527	.257	.183	.072	.266
ITEM_3	.094	.257	.340	.174	.156	.098
ITEM_4	.113	.183	.174	.543	.263	.125
ITEM_5	-.060	.072	.156	.263	.508	.014
ITEM_6	.117	.266	.098	.125	.014	.469

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.260	4.086	4.371	.286	1.070	.010	6
Item Variances	.457	.340	.543	.204	1.599	.008	6
Inter-Item Covariances	.138	-.060	.266	.326	-4.397	.008	6
Inter-Item Correlations	.305	-.143	.608	.751	-4.259	.037	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	21.19	5.603	.332	.323	.717
ITEM_2	21.33	4.398	.645	.582	.621
ITEM_3	21.23	4.990	.598	.471	.649
ITEM_4	21.47	4.630	.541	.391	.657
ITEM_5	21.24	5.491	.266	.393	.742
ITEM_6	21.33	5.180	.398	.310	.702

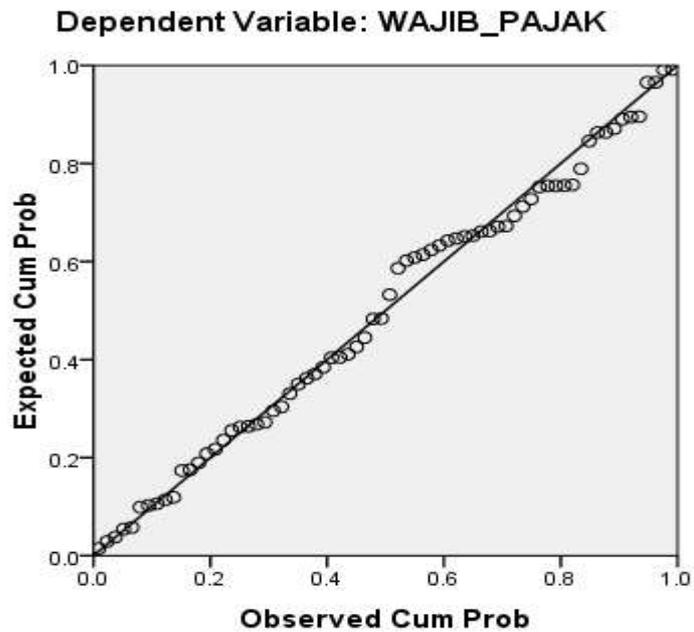
Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.56	6.888	2.624	6

UJI ASUMSI KLASIK

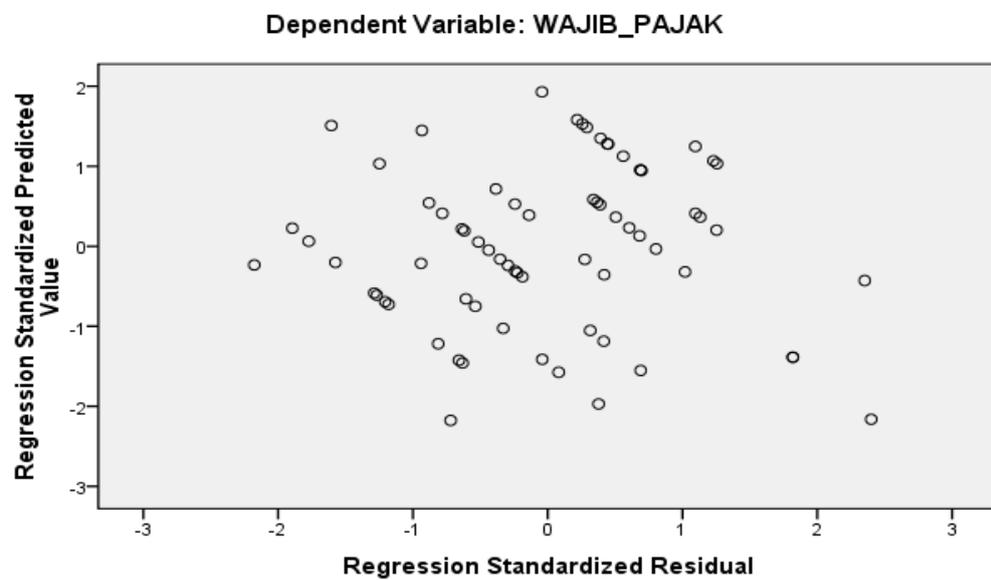
a. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



UJI HIPOTESIS

a. Koefisien Determinan (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.874	.807	3.421

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

b. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.416	3.461		4.499	.000
TEX_EXPO	.271	.152	.182	2.982	.004
SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	3.216	.002
WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

REGRESSION LINEAR BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
WAJIB_PAJAK	16.76	1.959	70
TEX_EXPO	12.93	1.311	70
SOSIALISASI_PAJAK	15.81	1.591	70
WEBSITE_PAJAK	16.47	1.751	70
BROSUR_PAJAK	13.07	1.376	70

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.611 ^a	.374	.335	1.597	.374	9.706	4	65	.000

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.043	4	24.761	9.706	.000 ^a
	Residual	165.828	65	2.551		
	Total	264.871	69			

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.416	3.461		-1.276	.207
	TEX_EXPO	.271	.152	.182	1.790	.078
	SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	2.939	.005
	WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
	BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14.15	19.07	16.76	1.198	70
Residual	-3.477	3.833	.000	1.550	70
Std. Predicted Value	-2.176	1.929	.000	1.000	70
Std. Residual	-2.177	2.400	.000	.971	70

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

RIWAYAT HIDUP



ARIF Lahir pada tanggal 07 Maret 1994 di Bakaru, merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara yang diamanahkan Allah SWT kepada pasangan Ayahanda tercinta Pawallangi dan Ibunda tercinta Sabaria.

Pada tahun 2007, penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri 155 Bakaru, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Pinrang, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah pinrang dan tamat pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun yang sama yakni 2013 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Akuntansi, mengambil program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

Skripsi

**PENGARUH INFORMASI PERPERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL
COMMUNITY CLUSTER* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ARIF
105730431013**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL COMMUNITY*
CLUSTER TERHADAP TINGKAT KEPATUAHAN WAJIB PAJAK
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**ARIF
105730431013**

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : **Pengaruh informasi perpajakan berbasis *social community cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

NamaMahasiswa : ARIF

NomorStambuk : 105730431013

Program Studi : Akuntansi

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dan di Seminarkan pada Hari rabu, 09 Mei 2018.

Makassar, Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Jamaluddin, M,SE, M.Si

Mira, SE., M.Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE. MM
KTAM: 497794

Ismail Badollahi, SE.,M.Si. Ak. CA
NBM : 1073428

MOTTO

“ Berdoalah (mintalah) kepadaKU (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu ”. (QS. Al-Mukmin : 60)

“ Lanjutkanlah pendidikan kemanapun kamu mau dan sampai mana kemampuanmu kami berdua hanya bisa mendoakanmu dari belakang “ (Ibu, Keluarga Tercinta)

“ Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future”

“ Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan “ (Penulis)

ABSTRAK

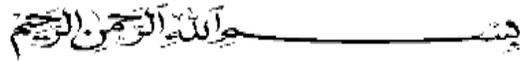
ARIF. 2018. Pengaruh Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Jamaluddin dan Pembimbing II Mira

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa tax expo, Sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan Perusahaan tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang masyarakat wajib pajak Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berupa tax expo, sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Hal ini terbukti dengan pengujian hipotesis melalui hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,911 yang berarti bahwa hubungan antara *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berupa tax expo, sosialisasi Pajak, Brosur Pajak dan website pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 91,1%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dalam 9,706 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena profitabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Atau bisa dikatakan bahwa *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kata Kunci: *Informasi Perpajakan Berbasis Sosial Community Cluster, Tax Expo, Sosialisasi Pajak, Brosur Pajak, Website Pajak, Wajib Pajak.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling bijak diberikan selain mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan karunia kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita semua, terutama keimanan, keislaman dan kekuatan khususnya kepada penulis sehingga telah menyelesaikan penelitian pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan

Penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik meteril maupun moril. Terutama dari kedua orang tua tersayang, ibunda **Sabaria** dan ayahanda **Pawallangi, Saudara Saudariku**, dan Teman-Teman seperjuangan AK,7,013 Dan terumah sahabat terbaik yaitu Adam, Jumriani nadir, kheruddin, Endang, Nurirawanti... Terima kasih atas kebarsamaan dan bantuannya selama ini. Pada kesempatan kali ini peneliti juga tak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Bapak Jamaluddin, M, SE, M.Si selaku Pembimbing I

5. Ibu Mira, SE., M.Si.Ak selaku Pembimbing II
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaraan perkuliahaan sampai akhir studi.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan banyak didikan, bimbingan, dukungan dan doa terumah dari segi financial, demi masa depan penulis
8. Almamater yang saya banggakan
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan pada “lampiran ucapan terimakasih” dalam laporanini.

Penelitian menyadari bahwa dalam penelitian ini tak luput dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis, oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah berikutnya. Peneliti menyambut baik bagi peneliti berikutnya yang berminat menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya peneliti sendiri.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Mei 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
.....	1
B. Rumusan Masalah.....	
.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	
.....	8
D. Manfaat Penelitian	
.....	9
II. TINJAUAN PUSATKA	
A. Landasan Teori.....	
.....	10
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	
.....	24
C. Kerangka Pikir	29

D. Hipotesis.....	29
-------------------	----

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Metode Analisis Data.....	
.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KKP Pratama Makassar selatan	40
B. Struktur Organisasi KKP Pratama Makassar selatan.....	42
C. Visi dan Misi KKP Pratama Makassar Selatan	46
D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar selatan.....	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

5.1 Kriteria Responden.....	48
5.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	49
5.3 Validasi Instrumen Pertanyaan Tax expo	50
5.4 Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan	51
5.5 Validasi Instrumen Pertanyaan Sosialisasi Pajak.....	52
5.6 Validasi Instrumen Pertanyaan Website Pajak	53
5.7 Validitas Instrumen Pertanyaan Brosur Pajak.....	54
5.8 Validitas Instrumen Pertanyaan Wajib Pajak.....	54
5.9 Variables Entered/RemovedP	57
5.10 Model Summary ^b	58
5.11 ANOVA ^b	59
5.12 Coefficients ^a	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pikir	28
4.1 Struktur Organisasi.....	42
5.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	56
5.2 Scatterplot	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Reability
- Lampiran 4 Uji normalitas
- Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Regresi Linear berganda
- Lampiran 8 Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11 Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 12 SuratPengajuanJudul
- Lampiran 13 Surat Pengangkatan dosen Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajaksesuai yang diberikan pemerintah maka adanya informasi perpajakan masyarakat bisa melihat tata cara membayar pajak sehingga masyarakat tidak cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis di Amerika yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena kurang informasi perpajakan kepada masyarakat tingkat kesadaran

masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak sehingga adanya informasi perpajakan sehingga masyarakat bisa gampang melihat tata cara membayar pajak. Data informasi pajak yang di dapat dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahunan 2016 melalui *e-Filling* sampai batas waktu 31 Maret 2017 ada sebanyak 3,46 juta SPT. Sementara tahun sebelumnya hanya mencapai angka 1,08 juta SPT. Naiknya jumlah WP yang melaporkan SPT secara online tersebut dibarengi dengan penurunan jumlah WP yang melaporkan kewajibannya secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak maupun *drop box* yang disediakan. DJB mencatat SPT yang masih dilaporkan dengan cara konvensional sebanyak 6,21 juta SPT, dibandingkan tahun sebelumnya 6,51 juta SPT, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Adriani, 2014: 03)

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Anggaran penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp. 1.294,3 Triliun atau 67 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sedangkankan untuk tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.360.2

Triliun atau 75 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2017, dan wajib pajak orang pribadi berjumlah 165.957 SPT dan yg baru melapor sekitar 91.839 SPT, artinya ada sekitar 74.118 yang belum bayar pajak pribadi adapun wajib pajak badan berjumlah 57.309 SPT dan yang baru melapor sekitar 30.102 SPT masih ada sekitar 27.207 yang belum bayar pajak badan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rachman, 2010:32) Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Zain, 2008: 43)

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111). Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Ketidapatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Raja Malem Taringan bahwa permasalahan eksternal perpajakan berasal dari Wajib Pajak. Permasalahan eksternal tersebut timbul karena permasalahan internal dan sistem pajak itu sendiri. Pernyataan ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2003 di Pulau Jawa menyebutkan bahwa 41% responden tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkannya akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Darmin Nasution juga melihat bahwa masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut agar Indonesia dapat sebanding dengan Negara lain. Darmin juga tidak mengelak ketika ditanya apakah salah satu faktor yang membuat orang enggan membayar pajak adalah karena manfaatnya kurang begitu dirasakan.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulai *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assessmentsystem*. Dalam *official system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Nampak jelas bahwa *self assessmentsystem*. Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat

Jendral Pajak (Ditjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Menurut Isroah (2012:7), *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sebab masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri. Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undang dalam pasal 23A UUD 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemenkan ketiga kalinya pada tahun 2001) menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang” (LibertiPandiangan, 2014: 64).

Di kota makassar yang jumlah penduduknya mencapai 1.633.418 jiwa dan dengan adanya peraturan tentang penerimaan daerah yang salah satunya adalah kepemilikan dan pembayaran NPWP yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di kota Makassar terkenal , karena perusahaan swasta atau investor asing dengan banyak pengusaha yang kurang peduli dengan

pembayaran pajak tersebut. Banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan untuk menunjang kemajuan kota tersebut. Tidak hanya pengusaha pengusaha saja yang tidak mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP, masih banyak pengusaha Wajib Pajak lainnya yang tidak mendaftarkan dirinya ke Kantor Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus yang memang tidak asing lagi untuk semua masyarakat yaitu Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah pegawai pajak oleh karena itu banyak masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan namun dinikmati oleh oknum-oknum pajak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Wajib Pajak yang paham atas pajaknya yaitu wajib pajak yang mengerti, mengetahui pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban bayak pajaknya. Serta Wajib Pajak yang peduli atas pembangunan dan kemajuan untuk negaranya, sehingga pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. melakukan observasi pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan mengatakan bahwa masih banyak pengusaha yang belum membayar kewajiban pajaknya, serta masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Namun demikian tidaklah mudah menggugah kesadaran masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha asing yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya, karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit-belit, sehingga mereka sudah enggan bertemu dengan pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya. Bahkan ada pengusaha yang malas membayar pajaknya, karena pembayaran pajak dianggap tidak penting, dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya tersebut. Padahal kalau para pengusaha ini berminat untuk membayar pajak atau bahkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, banyak sekali yang akan di dapat dari kepemilikan NPWP, serta dari pembayaran rutin kewajiban pajaknya tersebut. Karena manfaat NPWP menurut Abdul Rahman adalah memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit pada bank, pembuatan Rekening Koran di bank, pengajuan SIUP atau TDP, pembayaran pajak final, pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, kemudahan pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak, bebas dari pengenaan fiskal luar negeri. Dengan demikian hanya pengusaha yang memang taat

membayar pajak saja yang mau mendaftarkan atau mengurus kepemilikan NPWP ini, dan tepat waktu untuk membayar pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya di kota Makassar. Walaupun tidak semua pengusaha mau mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP masih ada beberapa yang memang peduli pada peraturan pajak yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya peraturan pembayaran pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai landasan bagi pemungut pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk tepat membayarkan pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh informasi perpajakan berbasis *social community cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar Selatan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *tax expo*, sosialisasi, website, pajak dan brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor pelayanan Pajak pratama Makassar selatan ?
2. Manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Selatan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *tax expo*, sosialisasi, website, pajak dan brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor pelayanan Pajak pratama Makassar selatan.
2. Untuk mengetahui manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Selatatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berjalan dengan seimbang.

b. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui pelayanan pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Informasi perpajakan berbasis *social community cluster*

a. Pengertian pajak berbasis *social community cluster*

pajak berbasis *social community cluster* adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan. Dan membagi *social community cluster* kedalam dua kelompok, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

b. Pembagian pajak berbasis *social community cluster*

1) Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP)

Menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:Wajib PajakOrang Pribadi(WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

a) Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam

konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.

2).Wajib Pajak Badan (WP badan)

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT/*permanent establishment*). Definisi mengenai 'badan' ini dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Badan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan salah satu subjek pajak. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia disebut dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri. Dan manakala persyaratan subjektif maupun objektifnya telah terpenuhi, Subjek Pajak Badan disebut dengan Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Sedangkan Lembaga atau unit dari pemerintah yang tidak termasuk dalam pengertian badan adalah unit-unit tertentu yang memenuhi seluruh kriteria berikut [Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh]:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembiayaannya bersumber dari APBN (Pusat) atau APBD(Daerah);
 3. Penerimaannya dimasukkandalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah .Pembukuannya diperiksa oleh pengawasan fungsional negara. Kantor perwakilan Negara asing, seperti Kantor Kedutaan negara asing yang adadi Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 3 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 juga ditetapkan bukan sebagai WP Badan. Demikian juga dengan organisasi-organisasi internasional yang ada di Indonesia juga ditetapkan bukan sebagai WP badan dengan syarat:
- c. pajak berbasis *social community cluster* meliputi

1) *Tax expo*

Adalah Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, dan peran penting pajak kepada masyarakat, terutama pada jenjang yang paling dini sebagai pembayar pajak masa depan.

2) Sosialisasi pajak (talk show)

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pajak kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, tetapi melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu menjadi *agent of information* yaitu memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat lain.

3) Website pajak

suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

4) Brosur pajak

tujuan kami adalah pembayaran pajak yang efisien disertai kepatuhan untuk membayar pajak di kantor pajak pratama Makassar selatan terhadap ketentuan yang berlaku ...

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu Dan Sedangkan tujuan wajib pajak adalah di mana uang pembayaran pajak yang di gunakan untuk untuk membangun inspraturktur perkotaan terutama di kota Makassar.

b. Hak dan kewajiban wajib pajak

Tujuan hukum salah satunya adalah keadilan. Begitu juga dengan hukum pajak juga memiliki tujuan sebagaimana tujuan hukum pada

umumnya, yaitu tercapainya keadilan. Dalam hukum pajak, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Di dalam hukum pajak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur wajib pajak dengan kewajiban-kewajibannya, hukum pajak selain itu juga mengatur tentang hak-hak yang dapat dimiliki oleh wajib pajak. Berkaitan dengan pengertian kewajiban wajib pajak.

Rochmat Soemitro mengatakan: Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, wajib pajak dapat menunjukkan atau minta bantuan, atau memberi kuasa kepada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya (*persoonlijk*). Khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap melekat padanya, dan ia tetap bertanggung jawab, walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan

Adapun kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- c. Mengisi dengan benar SPT dan dimasukkan ke kantor pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- e. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak;

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

Sedangkan hak-hak wajib pajak adalah:

1. Mengajukan keberatan dan banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan bayar;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

3. Kepatuhan Pajak

a. pengertian kepatuhan pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010 :138)

Safitri mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (safitri dalam Rahayu, 2010)

Rahmanmengertikan “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Rahman, 2010: 32)

Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111)

b. Bentuk-bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang- undang perpajakan

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Untung Sukardji, Perkembangan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pemungutan PPN. SPT Masa PPN Sebagai Sarana Melakukan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pemungutan PPN Melaksanakan Kewajibannya.

- a) *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/1986 tanggal 27 Maret 1986 sebagai disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN).*
- b) *Ketika Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 ditetapkan tidak berlaku dan dig dengan Keputusan presiden Nomor 56 Tahun 1988*

Menurut WidiWidodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

a. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah

satu faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, system perpajakan, *defference factors*.

b. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan system perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historismelekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatanyang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

c. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

d. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.

- 2) Wajib Pajak wajib membayar kewajiban pajaknya pada Kantor Pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui Wajib Pajak sendiri.
- 3) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah terdaftar pada Kantor Pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Menurut Abdul Rahman (2010:33) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor pajak.

Sony Devano dan SitiKurniaRahayu,(2006: 111) Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwakeriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.

4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, yang menyetorkan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak tidak menunda untuk membayar kewajiban pajak yang terutang pada Kantor Pajak yang berada di daerah masing-masing. Serta wajib Pajak yang bersih dari hukuman karena tindakannya dalam bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010) Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan

mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, (Jatmiko,2006). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (PandapotanRitonga, 2011:15)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengertiperihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

3. Hambatan Pembayaran Pajak

Beberapa alasan Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Lebih banyak memakan waktu untuk melaksanakan peraturan hukumnya daripada peranjang hokum pajak
- b. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan

sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorupsi, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

- c. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak
- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.
- e. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa hambatan pembayaran pajak adalah penegakkan hukum yang kurang, peraturan yang terlalu berbelit-belit sehingga banyak Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajaknya, serta persepsi masyarakat atau Wajib Pajak yang beranggapa bahwa pemerintah menggunakan pajaknya untuk hal yang kurang mensejahterakan rakyatnya atau pemborosan pemakaian pajak untuk hal yang kurang penting.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Harjanti Puspa Arum (2012)

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Hasil penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner serta teknis analisis regresi berganda. Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu metode yang digunakan adalah *simple random sampling*, serta tempat pengambilan data dan responden. Kelebihan dari 26 penelitian ini adalah variabel yang digunakan lebih banyak, serta menggunakan fleksibilitas dan adapti

2. Lusiana Dewi (2011)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan mengoperasionalkan satu variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) poin kepatuhan Wajib Pajak yaitu Mendaftarkan Diri, Mengisi Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Batas waktu menyampaikan Surat Tahunan, Penyampaian Surat

Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Pembayaran Pajak terutang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 195 responden (Wajib Pajak) yang dikategorikan sebagai kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 5 (lima) kategori tidak patuh 30 responden atau 15,4%, kurang patuh 58 responden atau 29,7%, cukup patuh 36 responden atau 18,5%, patuh 35 responden atau 17,9% dan sangat patuh 36 responden atau 18,5%. deskriptif kuantitatif Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Dewi adalah adanya 7 (tujuh) poin kepatuhan Wajib Pajak yaitu Mendaftarkan Diri, Mengisi Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Batas waktu menyampaikan SuratPemberitahuan Tahunan, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Pembayaran Pajak Terutang. Kelebihan dari penelitian ini yaitu terdapat 7 poin kepatuhan wajib pajak yang dijabarkan peneliti.Kelemahan dari penelitian ini yaitu hanya mengangkat 1 (satu) variabel.Persamaan dalam peneilitian ini yaitu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian serta beberapa variabel yang dilakukan peneliti sebelumnya.

3. Cindy Jotopurnomo dan YenniMangoting (2013)

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Perbedaan pada penelitian ini adalah tempat dan waktu saat melakukan penelitian tersebut serta variabel Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak berada. Persamaan dari penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Fiskus untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak serta sama-sama menggunakan kuesioner.

4 .Sri Putri TitaMutia (2014)

Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun semakin tinggi.
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib pajak semakin tinggi.
- c. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.
- d. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin

tinggi. Kelebihan penelitian ini yaitu menjelaskan lebih dari dua variabel yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kelemahan pada penelitian ini kuesioner yang digunakan masih terlalu umum, belum menjurus pada variabel. Persamaan dari penelitian ini yaitu pengumpulan data dari responden yaitu menggunakan kuesioner dan teknik analisis data.

Tabel .Mapping jurnal penelitian terdahulu

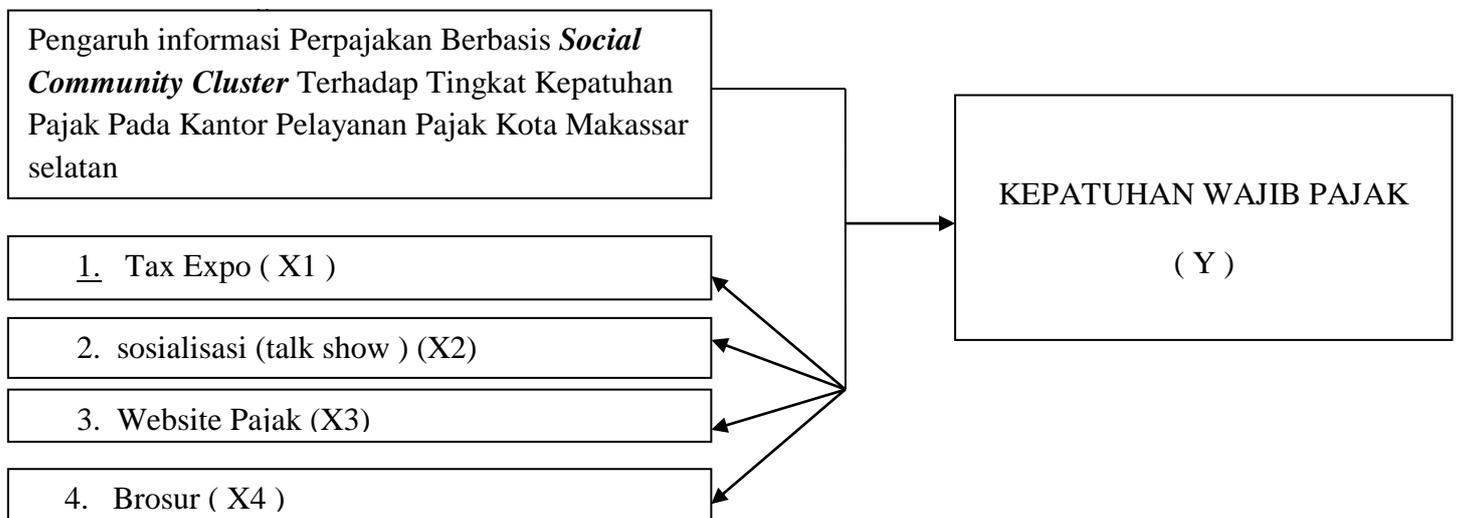
Tabel. 1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Metode penelitian variabel	Kesimpulan
1.	Bayu Cakoro dan Heru Susilo (2013)	pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak	Pengambilan sampel dengan teknik acak stratifikasi, analisis menggunakan regresi linear dan uji asumsi klasik	Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa ketiga variabel bebas yang diujikan antara lain pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara variabel terikat (motivasi wajib pajak)
2.	Asih dan Salman (2014)	Studi kepatuhan wajib pajak dari aspek pengetahuan, persepsi, dan system	metode kuantitatif	pihak direktorat jendral pajak sebagai sumber informasi perpajakan yang utama untuk

		administrasi.		senantiasa memberikan informasi terbaru pajak secara tepat waktu dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak.
3.	Irmayanti dan mildawati (2015)	Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Teknik analisis data menggunakan data primer dan menggunakan survey lapangan menggunakan kuisisioner	Modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi tidak mampu digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Septiyani Nur Khasanah	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Metode regresi linear	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pikir

Setiap penelitian pasti di perlukan adanya kerangka pikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian,



Gambar : 2.1 Kerangka pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian

1. Diduga bahwa informasiperpajakan berbasis *social community cluister* berupa *tax expo* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan
2. Diduga bahwa informasiperpajakan berbasis *social community cluister* berupa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan

3. Diduga bahwa informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa *website* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan
4. Diduga bahwa informasi perpajakan berbasis *social community cluster* berupa brosur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pratama Makassar selatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini rencana akan dimulai bulan april sampai mei 2017. Penelitian ini berlangsung di kantor pajak kota Makassar selatan. Penelitian ini dilakukan karena untuk melihat Pengaruh Informasi Perpajakan Berbasis *social community cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

B. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dan sedangkan kuantitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Menggambarkan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi maupun dokumentasi dan studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian yang akan di gunakan terdiri dari atas data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, kuesioner diambil dari penelitian

sebelumnya yang telah teruji. Instrumen dalam kuesioner partisipasi Dalam penelitian ini merupakan data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Pajak Berbasis *social Community Cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

2. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa kegiatan di kantor pajak yaitu *tax expo*, sosialisasi, website dan brosur apakah ketika 4 poin itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak lebih giat dan tidak malas lagi untuk membayar pajak terutama di kantor pajak pratama Makassar selatan, jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik ini yang akan digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya yang tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang di gunakan dan kemampuan tertentu dalam peneliti.

- a. Dokumentasi adalah Melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan *tax expo*, sosialisasi . website pajak dan brosur dan dari situlah kita mengambil data yang ingin kita teliti lebih jauh dan di lakukan di kantor pajak pratamamakassar selatan
- b. Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Tentang Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Pajak Berbasis *Social Community Cluster* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi (Sugiyono, 2012; 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 500 Wajib Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan

2. Sampel

Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan. Menentukan ukuran sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2008) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + (500) \cdot (0,01)^2}$$

$$n = 70 \text{ Responden}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Prosentase (%), toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Analisis Regresi berganda

Metode analisis data yang digunakan

adalah regresi berganda. Disamping itu, model analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang ada.

Metode persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi:

$$Y = a + Bx_1 + Bx_2 + Bx_3 + Bx_4 + e$$

Keterangan

- Y : Kepatuhan Pajak
 a : Konstan
 bx1 : Tax Expo
 bx2 : Sosialisasi
 bx3 : Websait Pajak
 bx4 : Brosur
 e : standar eror (tingkat kesalahan)

penilaian dilakukan dengan berdasarkan skala berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (SS)
 2. Tidak Setuju (TS)
 3. Setuju (S)
 4. sangat setuju (SS)
2. Uji Kulaitas Data
 - a. Uji Validitas

"Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat Validitas atau kesahitan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya" (Sugiyono, 2004:105) kriteria pengujian validitas hadala sebagai berikut:

- 1) Jika r hiding positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid

2) Jika r hitung negatif dan r hitung $< r^t$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliability

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibelakan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ujinormalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitiannya menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara pengamatan satu dan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dideteksi ada tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pola tertentu yang timbul teratur menunjukkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Untuk memperkuat uji scatterplot terdapat cara lain yaitu dengan pengujian statistik uji park. Apabila variabel independen memiliki tingkat signifikansinya melebihi 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*) Koefisiendeterminasi (*Adjusted R2*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).
- b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik) Dari ke 4 variabel independen (variabel bx_1) yang dimasukkan dalam regresi memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Jika nilai t-hitung (bx_2) $> (+)$ t-tabel atau t-hitung $(-) < (-)$ t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dimana kriteria penerimaan dan penolakan H_0 adalah :

- H_0 ditolak jika t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel
- H_0 diterima jika t-hitung (+) < (-) t-tabel atau t-hitung (-) > (-) t-tabel

DAFTAR PUSTAKA

- Bery. 2010. *pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Bukittinggi*
- Budi leksmana Antariksa, 2001 “ *pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Irmayani R dan Mildawati T, 2015 “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Isroah.(2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Jatmiko, NugrohoAgus (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca
- PandianganLiberti (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta.: Erlangga
- RahayuSitiKurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman Abdul. (2010). *AdministrasiPerpajakan*. Bandung: Nuansa.
- PJ A. Adriani. (2013). *Konsep Dasar Perpjakan*. Bandung:
- Rahmawatidkk, 2014 “ *pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Surakarta*” Universita Sebelas Maret, Surakarta.
- Resmi Siti .(2011). *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- SuhendraEupharasia Suzy,2010 “ *pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan*” Universitas Gunadarma
- zain Mohammad. 2012. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaSukoharjo*. Skripsi.

BAB IV

GAMABARAN UMUN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

Sampai akhir 2016, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 9 kepala seksi, 18 *account representative*, 1 bendahara, 2 sekretaris, 2 *operator console*, 2 jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegndalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

3. Bagian Kepegaiwaan

Bertugas melaksanakan urusan kepewaiian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan atau penyusunan arsip dan

dokumen.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah :

- a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b) Perubahan identitas WP.
- c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.
- d) Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.

f) Penerbitan SKP.

g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian

bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun

penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KKP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KKP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KKP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KKP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

^Berdasarkan penggunaan lahan, hanya sekitar 49% lahan di wilayah kerja KKP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah dan kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang banyak

berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal ini berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakkukang, Makassar, dan Rappocini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Responden

Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner yang dilakukan Pada tanggal 21 Juli 2017 sampai 27 juli 2017 dan kuesioner yang kembali sebanyak 70 kuesioner artinya persentase tingkat pengembalian kuesioner sebesar 70%. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat (warga sipil). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.1
Kriteria Responden

Kriteria	Jumlah	Persentase
Janis kelamin :		
- Laki-laki	40	57.2%
- Perempuan	30	42.8%
Tingkat Pendidikan		
- SMP	10	14.3%
- SMA	18	25.7%
- S1 (Strata Satu)	25	35.7%
- S2(Magister)	17	24.3%

Berdasarkan tabel 5.1 diatas maka jumlah responden paling banyak adalah responden laki-laki yaitu responden (57,2%), sedangkan responden perempuan yaitu responden (42,8%).

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dari 70 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian responden memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 25

responden (37,5 %), diikuti 18 responden dengan tingkat pendidikan SMA (25,7%), sebanyak 17 responden dengan tingkat pendidikan S2 (24,3%), dan 10 responden dengan tingkat pendidikan SMP (14,3%).

2. Analisis Statistik

a. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (Tax Expo, Sosialisasi Pajak, Website Pajak, Brosur Pajak, dan Wajib Pajak), peneliti menggunakan tabel deskriptif yang tersaji pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.2
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tax expo	70	9	15	884	12.63	1.310	1.715
Sosialisasi pajak	70	9	19	1082	15.46	2.090	4.368
Websit pajak	70	14	20	1158	16.54	1.742	3.034
Brosur pajak	70	10	15	880	12.57	1.303	1.698
Wajib pajak	70	13	20	1191	17.01	1.952	3.811
Valid N (listwise)	70						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 70 responden maka hasil pengukuran variabel tax expomempunyai total jawaban seluruhnya berjumlah 884 dengan jawaban terendah 9 dan jawaban tertinggi 15, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 12.63 dengan standar deviasi 1.310.

Hasil pengukuran variabel sosialisasi pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1082 dengan jawaban terendah 9 dan jawaban tertinggi 19, sehingga diperoleh skor jawaban responden

mempunyai rata-rata 15.46 dengan standar deviasi 2.090.

Hasil pengukuran variabel website pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1158 dengan jawaban terendah 6 dan jawaban tertinggi 14, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 16.54 dengan standar deviasi 1.742.

Hasil pengukuran variabel brosur pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 880 dengan jawaban terendah 5 dan jawaban tertinggi 10, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 12.57 dengan standar deviasi 1.303.

Hasil pengukuran variabel wajib pajak pada tabel terlihat, dari 70 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1191 dengan jawaban terendah 13 dan jawaban tertinggi 20, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 17.01 dengan standar deviasi 1.952.

b. Hasil Uji Kualitas Data

Ada dua prosedur yang dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas, yaitu:

Uji validitas dilakukan dengan melihat “korelasi antara skor butir dengan skor faktor hams berkorelasi positif, kemudian membandingkan r tabel dengan r hitung dari tiap butir pertanyaan pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $(n-k)$ ” (Santoso, 2000:41). Secara rinci hasil uji reliabilitas dan validitas disajikan pada lampiran 4 dan 5.

Tabel 5.3
Validitas Instrumen Pertanyaan Tax Expo

Item	<i>Corrected item total correlation</i> (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.489	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.398	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.249	0,244	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari hasil output *reliability* variabel tax expo pada lampiran tersebut, menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran adalah reliabel dengan *cronbach alfa* 0,860, yang berarti bahwa $0,860 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ketiga butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi dari masing-masing butir, yang dilanjutkan dengan mean dan standar deviasi untuk ketiga butir tersebut, yaitu 12.63 dan 1.310.

Tabel 5.4
Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Status
1.	Tax Expo (X_1)	0.860	Reliabel
2.	Sosialisasi Pajak (X_2)	0.625	Reliabel
3.	Website Pajak (X_3)	0.625	Reliabel
4.	Brosur Pajak (X_4)	0.739	Reliabel
5.	Wajib Pajak (Y)	0.723	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Kolom *Corrected Item Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan r_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan. Pada signifikansi 5% dengan derajat bebas $df = 63$, jumlah (kasus - k), r_{tabel} sebesar 0,244. Berdasarkan gambar pada tabel 5.3 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel Sosialisasi Pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan cronbach alpha adalah 0,625 yang berarti $0,625 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke empat butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 15.46 dan 2.090.

Tabel 5.5
Validitas Instrumen Pertanyaan Sosialisasi Pajak

Item	<i>Corrected item total correlation</i> (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	.278	0,244	Valid
Pertanyaan 2	.690	0,244	Valid
Pertanyaan 3	.449	0,244	Valid
Pertanyaan 4	.370	0,244	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (datadiolah)

Selanjutnya, output *reliability* menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel sosialisasi pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.5 terlihat bahwa hasil

uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel website pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.625 yang berarti $0,625 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke empat butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 16.54 dan 1.742.

Tabel 5.6
Validitas Instrumen Pertanyaan Website Pajak

Item	<i>Corrected item total correlation</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.332	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.645	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.598	0,244	Valid
Pertanyaan 4	0.541	0,244	Valid
Pernyataan 5	0.266	0,244	Valid
Pernyataan 6	0.398	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output *realibility* menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel website pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.5 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel brosur pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.739 yang berarti $0,739 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke tiga butir pertanyaan yang

mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 12.27 dan 1.303.

Tabel 5.7
Validitas Instrumen Pertanyaan Brosur Pajak

Item	<i>Corrected item total correction</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.372	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.515	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.694	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel brosur pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.6 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel wajib pajak dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.723 yang berarti $0,723 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ke enam butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 17.01 dan 1.952.

Tabel 5.8
Validitas Instrumen Pertanyaan Wajib Pajak

Item	<i>Corrected item total correction</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.332	0,244	Valid
Pertanyaan 2	0.645	0,244	Valid
Pertanyaan 3	0.598	0,244	Valid
Pertanyaan 4	0.541	0,244	Valid
Pernyataan 5	.266	0,244	Valid
Pernyataan 6	.398	0,244	Valid

Sumber :Hasil PengolahanData Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel website pajak. Berdasarkan gambar pada tabel 5.6 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

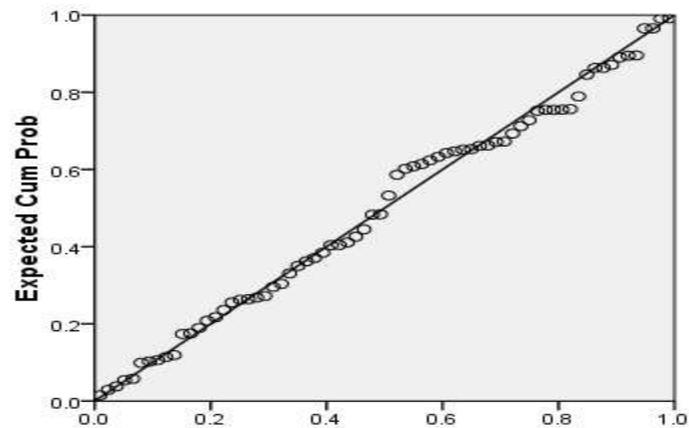
c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

Pada penelitian ini hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal,serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan *budgetary slack* berdasarkan masukan variabel independennya yaitu partisipasi anggaran dan informasi asimetri.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Wajib Pajak**

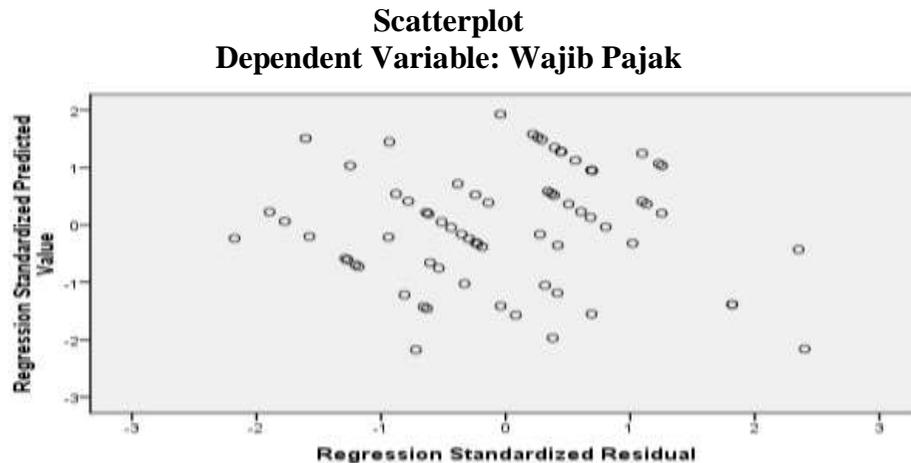


Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SREISD dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

- a) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari grafik *Scatterplot* dan *Partial Regression Plot* penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (lampiran 4), sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi wajib pajak berdasarkan masukan variabel independennya (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak).

d. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji R (Determinan)

Berdasarkan hasil olahan SPSS, maka di bawah ini adalah hasil output

SPSS 20:

Tabel 5.9
Variables Entered/Removed^P

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Brosur_Pajak, Tex_Expo, Sosialisasi_Pajak, Website_Pajak ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5.9 *variables Entered Removed* menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak.
- b. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (*removed*).
- c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter.

Tabel 5.10
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.874	.807	3.421

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2007 (data diolah)

Dari tabel model summary di atas dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,911 yang berarti bahwa hubungan antara tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak dengan wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 91.1%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,874. Yang berarti bahwa variabel dependen (wajib pajak) mampu dijelaskan oleh variabel independent (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak dan website pajak) sebesar 87,4%, dan selebihnya 12,6% (100% - 87,4%) dapat dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,807 atau 80,7% pengaruh independen terhadap dependen..

2. Uji F (Simultan)

Berdasarkan analisis SPSS 20 maka diperoleh output sebagai berikut

Tabel 5.11
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.043	4	24.761	9.706	.000 ^a
	Residual	165.828	65	2.551		
	Total	264.871	69			

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung > F tabel yaitu $9.706 > 2,51$. Kemudian taraf signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) kurang dari 0,05, maka model regresi berganda bisa dipakai untuk memprediksi tingkat wajib pajak. Atau bisa dikatakan bahwa tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak berpengaruh terhadap wajib pajak.

3. Uji t (Individual)

Berdasarkan hasil analisis SPSS 20, maka diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 5.12
Coefficients³

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.416	3.461		4.499	.000
TEX_EXPO	.271	.152	.182	2.982	.004
SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	3.216	.002
WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.11 pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.416 + 0.271X_1 + 0.358X_2 + 0.386X_3 + 0.431X_4$$

Konstanta sebesar 4,416 menyatakan bahwa jika tidak ada tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak, maka kinerja manajerial adalah sebesar 15.862.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.11, diperoleh t

1. Tax expo berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $2.982 > t$ tabel 1.997
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $3.216 > t$ tabel 1.997
3. Website pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $3.390 > t$ tabel 1.997
4. Brosur pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak karena nilai t hitung $3.060 > t$ tabel 1.997

Dengan demikian hasil peneliti menerima hipotesis pada uji F, yang berarti tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, dan website pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian pada uji t hipotesis dapat sepenuhnya diterima karena semua variabel independen mempunyai angka profitabilitas jauh lebih kecil dari $0,05$.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa masing-masing variabel yang diikutsertakan dalam penelitian ini telah memenuhi kualitas yang baik, yaitu valid dan reliabel. Selain itu semua variabel terbebas dari asumsi klasik sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas data yang baik.

1. Dalam uji hipotesis yang pertama (H_1) tentang Tax expo berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t -hitung variabel tax expo adalah sebesar $2,982$, dengan nilai signifikan sebesar $0,004$ sedangkan nilai t -tabel $1,997$, sehingga t -hitung $>$ t -tabel ($2,982 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa tax expo (X_1) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Salman (2011) dengan judul “ studi kepatuhan wajib pajak dari aspek pengetahuan, persepsi, dan sistem administrasi. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh

direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community cluster* merupakan salah satu cara yang digunakan direktorat jendral pajak untuk memberikan informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak badan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Dalam uji hipotesis yang kedua (H_2) tentang sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel sosialisasi pajak adalah sebesar 3,216, dengan nilai signifikan sebesar 0,002 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,216 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima, dan membuktikan bahwa sosialisasi pajak (X_2) secara statistic berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan Cakoro dan susilo (2015) dengan judul “ pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community clusters* salah satunya yaitu sosialisasi pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak.

3. Dalam uji hipotesis yang ketiga (H₃) tentang Website Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel Website Pajak adalah sebesar 3,390, dengan nilai signifikan sebesar 0,004 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga t-hitung > t-tabel (3,390 > 1,997). Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, dan membuktikan bahwa Website Pajak (X₃) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwadengan adanya informasi perpajakan seperti website pajak dapat dilihat di (www.pajak.go.id) maka wajib pajak akan lebih mudah memperoleh informasi perpajakan dan informasi tersebut dapat diakses kapan saja. Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) dengan judul “Pengaruhpengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community clustery* yaitu website pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
4. Dalam uji hipotesis yang ke empat (H₄) tentang brosur pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5.11 diketahui t-hitung variabel Website Pajak adalah sebesar 3,066, dengan nilai signifikan sebesar 0,004 sedangkan nilai t-tabel 1,997, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,066 > 1,997$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa Website Pajak (X_4) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selanjutnya dengan melihat item-item informasi yang digunakan oleh direktorat jendral pajak yang menjadi instrument penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya informasi perpajakan seperti brosur pajak akan memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada wajib pajak tentang informasi perpajakan, dengan adanya brosur pajak maka wajib pajak akan mengetahui informasi terbaru mengenai perpajakan. Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti dan mildawati (2015) dengan judul “ Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh direktorat jendral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran pajak. pelaksanaan informasi perpajakan berbasis *social community cluster* yaitu brosur pajak dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan, yang dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan lima maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linear berganda, diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak terhadap wajib pajak dengan arah positif, artinya semakin tinggi informasi perpajakan berbasis *social community* berupa *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan.
2. Dari hasil penelitian dan olah data yang dilakukan dari keempat variabel independen yaitu *tax expo*, sosialisasi pajak, brosur pajak dan website pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah variabel website pajak terlihat dari hasil uji t yang dilakukan nilai konstanta variabel website pajak jauh dibawah 0,05 yaitu 0,001.

B. Saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan justifikasi bagi kepentingan praktis, dalam rangka peningkatan wajib pajak di Makassar. Berikut ini beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan keterbatasan antara lain:

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan untuk menghindari bias responden atau rendahnya *reposisi rate*, maka sebaiknya diusahakan menggunakan metode observasi (pengamatan) langsung kepada objek atau metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.
2. Memperluas lingkup penelitian (wilayah penelitian), memperbanyak sampel dan pemilihan sampel yang acak, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan
3. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun variabel moderating, karena peningkatan wajib pajak di Makassar tidak hanya diukur dari pengaruh penerapan berbasis social community cluster (tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak dan wajib pajak).
4. Untuk kantor pajak pratama makassar selatan buat pegawainya yang di bagian tempat bayar pajak agar selalu tersenyum kita ada orang yang ingin bayar pajak.

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif

NIM : 105730 4310 13

Jurusan : Akuntansi

mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS *SOCIAL COMUNITY CLUSTER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN”**.

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan, yang biasanya diwakili oleh staf / ahli pajak. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan bapak / ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.

Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu saya mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner. Saya menjamin kerahasiaan dari semua pendapat / opini / jawaban yang bapak / ibu berikan dalam kuesioner terlampir sesuai dengan etika penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

ARIF

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha : Perdagangan Industri
 Jasa Lain-lain

IDENTITAS RESPONDEN

Beritanda (X) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara

3. Nama :
4. Umur : <25 25-35
 36-55 >55
5. Jenis Kelamin : Pria Wanita
6. Pendidikan Terakhir : S3 S2 S1 D3 Lainnya
7. Lama Bekerja : < 1 Tahun
 Antara 1-5 tahun
 Antara 6-10 tahun
 > 10 Tahun
8. Pengetahuan Pajak : Brevet Penyuluh Pajak
 Tidak Ada Lainnya

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut:

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Kurang Setuju (KS)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

Catatan :Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PERNYATAAN
Penilaian Variabel-variabel Penelitian

A. Tax Expo (X1)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	<i>Tax Expo</i> dapat memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak					
2.	Adanya Account Representative dan <i>tax expo</i> yang diadakan DJP benar-benar membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>tax expo</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					

B. Sosialisasi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan serta rutin melakukan pemeriksaan					
2.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak					
3.	Wajib Pajak senang jika dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP					
4.	SDM yang melakukan sosialisasi Direktorat Pajak telah memiliki keahlian yang kompeten terutama di bidang perpajakan dan mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak					

C. Website Pajak (X3)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	System administrasi modern (digitalisasi: e-SPT, e-filing) sudah Benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan					
2.	Pembayaran secara on-line (teller-bank, interner banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak kerana prosesnya cepat					
3.	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang diakses melalui situs pajak					
4.	<i>Complain Center</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					

D. Variabel Brosur Pajak (X4)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib Pajak akan dimudahkan jika DJP membuat brosur pajak lengkap didampingi dengan AR					
2.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dlaam Brosur Pajak					
3.	Brosur pajak sebaiknya dobagikan kepada seua wajib pajak yang disertai dengan penjelasan dari petugas Pajak					

E. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela pada Direktorat Jendral Pajak dikukuhkan sebagai PKP					
2.	Wajib Pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu					
3.	Wajib Pajak menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum					

	batas akhir penyampaian SPT					
4.	Wajib Pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
5.	Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan					
6.	Wajib pajak telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan					

LAMPIRAN 1

TABULASI HASIL KUESIONER TEX EXPO

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
1	5	4	5	14
2	3	3	3	9
3	4	4	5	13
4	5	5	5	15
5	4	5	4	13
6	5	4	4	13
7	5	5	5	15
8	5	5	4	14
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	4	4	4	12
12	5	4	4	13
13	5	4	4	13
14	5	5	4	14
15	4	4	4	12
16	5	5	4	14
17	4	5	5	14
18	4	2	5	11
19	4	3	4	11
20	3	4	4	11
21	4	4	4	12
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	4	4	5	13
26	4	4	5	13
27	4	4	4	12
28	3	4	4	11
29	5	4	5	14
30	5	5	5	15
31	4	5	4	13
32	4	4	4	12
33	5	4	5	14
34	5	4	4	13
35	4	4	3	11
36	4	4	4	12
37	5	5	5	15

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
38	4	4	5	13
39	4	4	4	12
40	5	5	4	14
41	4	4	3	11
42	5	4	3	12
43	4	4	4	12
44	4	4	4	12
45	4	4	4	12
46	3	3	3	9
47	4	4	5	13
48	5	5	5	15
49	4	5	4	13
50	5	4	4	13
51	5	5	5	15
52	5	5	4	14
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	4	4	4	12
56	5	4	4	13
57	5	4	4	13
58	5	5	4	14
59	4	4	4	12
60	5	5	4	14
61	4	5	5	14
62	4	2	5	11
63	4	3	4	11
64	3	4	4	11
65	4	4	4	12
66	4	4	4	12
67	4	4	4	12
68	4	4	4	12
69	4	4	5	13
70	4	4	5	13

TABULASI HASIL KUESIONER SOSIALISASI PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
1	4	3	3	3	13
2	4	3	3	4	14
3	3	4	4	4	15
4	3	3	4	3	13
5	3	3	4	4	14
6	3	3	4	4	14
7	3	3	3	4	13
8	5	4	5	5	19
9	5	1	1	2	9
10	3	3	5	4	15
11	4	4	5	3	16
12	4	4	5	3	16
13	5	4	4	4	17
14	3	3	4	4	14
15	3	4	4	4	15
16	3	4	4	4	15
17	5	5	4	3	17
18	3	4	4	4	15
19	4	5	4	4	17
20	5	5	4	5	19
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	4	19
23	4	4	4	4	16
24	4	4	5	4	17
25	4	4	4	4	16
26	3	3	4	4	14
27	3	4	5	4	16
28	2	4	2	4	12
29	4	4	5	3	16
30	4	4	4	4	16
31	3	3	3	4	13
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	3	3	4	4	14
36	4	4	5	4	17
37	5	5	4	4	18
38	5	4	5	5	19

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
39	4	5	5	5	19
40	4	4	4	4	16
41	3	3	4	4	14
42	4	4	4	4	16
43	5	4	3	5	17
44	4	3	4	4	15
45	4	3	3	3	13
46	4	3	3	4	14
47	3	4	4	4	15
48	3	3	4	3	13
49	3	3	4	4	14
50	3	3	4	4	14
51	3	3	3	4	13
52	5	4	5	5	19
53	5	1	1	2	9
54	3	3	5	4	15
55	4	4	5	3	16
56	4	4	5	3	16
57	5	4	4	4	17
58	3	3	4	4	14
59	3	4	4	4	15
60	3	4	4	4	15
61	5	5	4	3	17
62	3	4	4	4	15
63	4	5	4	4	17
64	5	5	4	5	19
65	4	4	4	4	16
66	5	5	5	4	19
67	4	4	4	4	16
68	4	4	5	4	17
69	4	4	4	4	16
70	3	3	4	4	14

TABULASI HASIL KUESIONER WEBSITE PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
1	4	3	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	3	4	4	4	15
4	3	4	3	4	14
5	5	5	5	4	19
6	5	5	5	5	20
7	4	5	4	5	18
8	5	5	4	4	18
9	4	5	4	4	17
10	3	4	4	4	15
11	4	5	5	4	18
12	4	5	5	5	19
13	4	4	4	3	15
14	4	4	4	3	15
15	4	4	4	3	15
16	5	4	3	4	16
17	4	5	5	2	16
18	3	5	4	4	16
19	3	4	4	4	15
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	4	5	5	5	19
24	4	4	5	4	17
25	4	5	5	5	19
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	4	16
28	5	4	4	4	17
29	2	4	4	4	14
30	5	5	4	2	16
31	4	5	4	4	17
32	5	5	4	4	18
33	5	4	4	5	18
34	2	4	4	4	14
35	3	4	3	4	14
36	4	3	4	4	15
37	4	4	4	4	16
38	3	4	4	4	15

NO	P.1	P.2	P.3	P.3	JUMLAH
39	3	4	3	4	14
40	5	5	5	4	19
41	5	5	5	5	20
42	4	5	4	5	18
43	5	5	4	4	18
44	4	5	4	4	17
45	3	4	4	4	15
46	4	5	5	4	18
47	4	5	5	5	19
48	4	4	4	3	15
49	4	4	4	3	15
50	4	4	4	3	15
51	5	4	3	4	16
52	4	5	5	2	16
53	3	5	4	4	16
54	3	4	4	4	15
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	5	5	5	19
59	4	4	5	4	17
60	4	5	5	5	19
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	5	4	4	4	17
64	2	4	4	4	14
65	5	5	4	2	16
66	4	5	4	4	17
67	5	5	4	4	18
68	5	4	4	5	18
69	2	4	4	4	14
70	3	4	3	4	14

TABULASI HASIL KUESIONER BROSUR PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
1	4	4	4	12
2	4	4	4	12
3	4	4	5	13
4	4	4	4	12
5	5	4	4	13
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	5	4	4	13
9	3	4	3	10
10	5	4	4	13
11	4	5	5	14
12	4	4	4	12
13	4	5	5	14
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	3	4	11
19	5	5	5	15
20	4	3	4	11
21	4	3	3	10
22	5	4	4	13
23	4	4	4	12
24	5	5	5	15
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	4	4	5	13
29	5	4	5	14
30	5	5	5	15
31	5	4	5	14
32	5	3	4	12
33	3	4	4	11
34	5	4	4	13
35	4	4	4	12
36	4	4	4	12
37	4	4	4	12
38	4	4	5	13

NO	P.1	P.2	P.3	JUMLAH
39	4	4	4	12
40	5	4	4	13
41	4	4	4	12
42	4	4	4	12
43	5	4	4	13
44	3	4	3	10
45	5	4	4	13
46	4	5	5	14
47	4	4	4	12
48	4	5	5	14
49	4	4	4	12
50	4	4	4	12
51	4	4	4	12
52	4	4	4	12
53	4	3	4	11
54	5	5	5	15
55	4	3	4	11
56	4	3	3	10
57	5	4	4	13
58	4	4	4	12
59	5	5	5	15
60	5	5	5	15
61	4	4	4	12
62	4	4	4	12
63	4	4	5	13
64	5	4	5	14
65	5	5	5	15
66	5	4	5	14
67	5	3	4	12
68	3	4	4	11
69	5	4	4	13
70	4	4	4	12

TABULASI HASIL KUESIONER WAJIB PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	JUMLAH
1	4	3	3	4	5	5	14
2	4	4	4	3	4	4	15
3	4	4	4	3	4	5	15
4	4	4	5	4	4	5	17
5	5	5	5	4	4	4	19
6	5	5	5	5	5	5	20
7	4	5	5	5	5	4	19
8	4	4	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	5	4	16
10	5	5	4	3	3	5	17
11	5	5	5	4	5	5	19
12	5	5	5	4	5	5	19
13	5	4	4	5	5	4	18
14	5	5	4	4	4	4	18
15	5	4	4	5	5	4	18
16	4	4	4	4	3	5	16
17	4	2	4	4	5	2	14
18	3	4	4	2	5	3	13
19	4	4	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	4	4	16
22	5	4	5	4	4	4	18
23	4	5	5	5	5	4	19
24	4	4	4	4	4	5	16
25	4	5	5	5	5	5	19
26	4	3	4	3	3	3	14
27	4	3	4	3	4	4	14
28	3	4	4	5	5	4	16
29	5	4	4	4	3	4	17
30	5	5	5	5	5	5	20
31	4	4	5	5	5	4	18
32	5	4	3	4	3	4	16
33	5	5	5	4	4	4	19
34	5	5	5	5	5	5	20
35	5	5	4	4	4	4	18
36	5	5	5	4	4	4	19
37	4	3	3	4	5	5	14
38	4	4	4	3	4	4	15

NO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	JUMLAH
39	4	4	4	3	4	5	15
40	4	4	5	4	4	5	17
41	5	5	5	4	4	4	19
42	5	5	5	5	5	5	20
43	4	5	5	5	5	4	19
44	4	4	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	5	4	16
46	5	5	4	3	3	5	17
47	5	5	5	4	5	5	19
48	5	5	5	4	5	5	19
49	5	4	4	5	5	4	18
50	5	5	4	4	4	4	18
51	5	4	4	5	5	4	18
52	4	4	4	4	3	5	16
53	4	2	4	4	5	2	14
54	3	4	4	2	5	3	13
55	4	4	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	4	4	16
58	5	4	5	4	4	4	18
59	4	5	5	5	5	4	19
60	4	4	4	4	4	5	16
61	4	5	5	5	5	5	19
62	4	3	4	3	3	3	14
63	4	3	4	3	4	4	14
64	3	4	4	5	5	4	16
65	5	4	4	4	3	4	17
66	5	5	5	5	5	5	20
67	4	4	5	5	5	4	18
68	5	4	3	4	3	4	16
69	5	5	5	4	4	4	19
70	5	5	5	5	5	5	20

LAMPIRAN 2

REABILITY TAX EXPO

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.860	.857	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.27	.588	70
ITEM_2	4.14	.643	70
ITEM_3	4.21	.562	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	1.000	.471	.260
ITEM_2	.471	1.000	.155
ITEM_3	.260	.155	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	.346	.178	.086
ITEM_2	.178	.414	.056
ITEM_3	.086	.056	.316

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.210	4.143	4.271	.129	1.031	.004	3
Item Variances	.358	.316	.414	.098	1.311	.003	3
Inter-Item Covariances	.107	.056	.178	.122	3.185	.003	3
Inter-Item Correlations	.295	.155	.471	.316	3.045	.021	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	8.36	.842	.489	.258	.266
ITEM_2	8.49	.833	.398	.223	.413
ITEM_3	8.41	1.116	.249	.069	.638

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.63	1.715	1.310	3

REABILITY SOSIALISASI PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.625	.625	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	3.81	.786	70
ITEM_2	3.74	.811	70
ITEM_3	4.01	.825	70
ITEM_4	3.89	.603	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4
ITEM_1	1.000	.333	.049	.016
ITEM_2	.333	1.000	.569	.443
ITEM_3	.049	.569	1.000	.353
ITEM_4	.016	.443	.353	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4
ITEM_1	.617	.212	.032	.007
ITEM_2	.212	.658	.381	.217
ITEM_3	.032	.381	.681	.176
ITEM_4	.007	.217	.176	.364

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.864	3.743	4.014	.271	1.073	.013	4
Item Variances	.580	.364	.681	.317	1.873	.021	4
Inter-Item Covariances	.171	.007	.381	.373	51.056	.017	4
Inter-Item Correlations	.294	.016	.569	.553	36.142	.044	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	11.64	3.247	.278	.156	.714
ITEM_2	11.71	2.091	.690	.484	.308
ITEM_3	11.44	2.511	.449	.354	.521
ITEM_4	11.57	3.205	.370	.226	.585

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.46	4.368	2.090	4

REABILITY WEBSITE PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.725	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.37	.594	70
ITEM_2	4.23	.726	70
ITEM_3	4.33	.583	70
ITEM_4	4.09	.737	70
ITEM_5	4.31	.713	70
ITEM_6	4.23	.685	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	1.000	.473	.270	.257	-.143	.287
ITEM_2	.473	1.000	.608	.342	.139	.535
ITEM_3	.270	.608	1.000	.406	.376	.245
ITEM_4	.257	.342	.406	1.000	.499	.248
ITEM_5	-.143	.139	.376	.499	1.000	.029
ITEM_6	.287	.535	.245	.248	.029	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	.353	.204	.094	.113	-.060	.117
ITEM_2	.204	.527	.257	.183	.072	.266
ITEM_3	.094	.257	.340	.174	.156	.098
ITEM_4	.113	.183	.174	.543	.263	.125
ITEM_5	-.060	.072	.156	.263	.508	.014
ITEM_6	.117	.266	.098	.125	.014	.469

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.260	4.086	4.371	.286	1.070	.010	6
Item Variances	.457	.340	.543	.204	1.599	.008	6
Inter-Item Covariances	.138	-.060	.266	.326	-4.397	.008	6
Inter-Item Correlations	.305	-.143	.608	.751	-4.259	.037	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	21.19	5.603	.332	.323	.717
ITEM_2	21.33	4.398	.645	.582	.621
ITEM_3	21.23	4.990	.598	.471	.649
ITEM_4	21.47	4.630	.541	.391	.657
ITEM_5	21.24	5.491	.266	.393	.742
ITEM_6	21.33	5.180	.398	.310	.702

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.56	6.888	2.624	6

REABILITY BROSUR PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.701	.704	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.29	.568	70
ITEM_2	4.06	.535	70
ITEM_3	4.23	.543	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	1.000	.231	.443
ITEM_2	.231	1.000	.652
ITEM_3	.443	.652	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3
ITEM_1	.323	.070	.137
ITEM_2	.070	.287	.190
ITEM_3	.137	.190	.295

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.190	4.057	4.286	.229	1.056	.014	3
Item Variances	.301	.287	.323	.036	1.127	.000	3
Inter-Item Covariances	.132	.070	.190	.119	2.694	.003	3
Inter-Item Correlations	.442	.231	.652	.421	2.820	.035	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	8.29	.961	.372	.202	.790
ITEM_2	8.51	.891	.515	.430	.613
ITEM_3	8.34	.750	.694	.516	.375

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.57	1.698	1.303	3

REABILITY WAJIB PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.725	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.37	.594	70
ITEM_2	4.23	.726	70
ITEM_3	4.33	.583	70
ITEM_4	4.09	.737	70
ITEM_5	4.31	.713	70
ITEM_6	4.23	.685	70

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	1.000	.473	.270	.257	-.143	.287
ITEM_2	.473	1.000	.608	.342	.139	.535
ITEM_3	.270	.608	1.000	.406	.376	.245
ITEM_4	.257	.342	.406	1.000	.499	.248
ITEM_5	-.143	.139	.376	.499	1.000	.029
ITEM_6	.287	.535	.245	.248	.029	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6
ITEM_1	.353	.204	.094	.113	-.060	.117
ITEM_2	.204	.527	.257	.183	.072	.266
ITEM_3	.094	.257	.340	.174	.156	.098
ITEM_4	.113	.183	.174	.543	.263	.125
ITEM_5	-.060	.072	.156	.263	.508	.014
ITEM_6	.117	.266	.098	.125	.014	.469

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.260	4.086	4.371	.286	1.070	.010	6
Item Variances	.457	.340	.543	.204	1.599	.008	6
Inter-Item Covariances	.138	-.060	.266	.326	-4.397	.008	6
Inter-Item Correlations	.305	-.143	.608	.751	-4.259	.037	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	21.19	5.603	.332	.323	.717
ITEM_2	21.33	4.398	.645	.582	.621
ITEM_3	21.23	4.990	.598	.471	.649
ITEM_4	21.47	4.630	.541	.391	.657
ITEM_5	21.24	5.491	.266	.393	.742
ITEM_6	21.33	5.180	.398	.310	.702

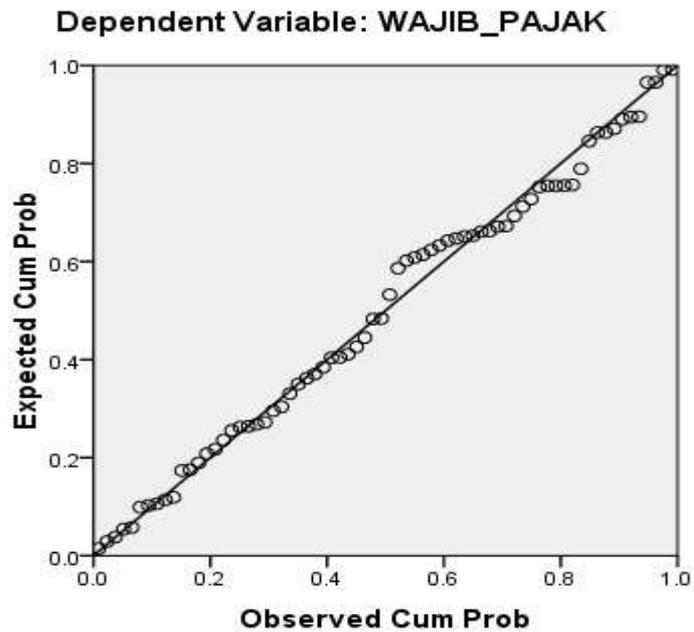
Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.56	6.888	2.624	6

UJI ASUMSI KLASIK

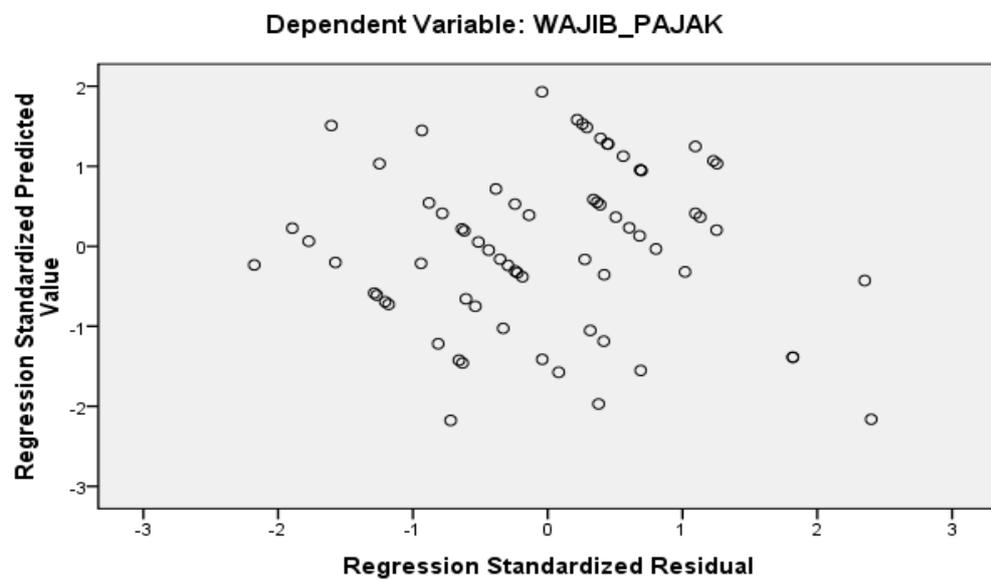
a. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



UJI HIPOTESIS

a. Koefisien Determinan (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.874	.807	3.421

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

b. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.416	3.461		4.499	.000
TEX_EXPO	.271	.152	.182	2.982	.004
SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	3.216	.002
WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

REGRESSION LINEAR BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
WAJIB_PAJAK	16.76	1.959	70
TEX_EXPO	12.93	1.311	70
SOSIALISASI_PAJAK	15.81	1.591	70
WEBSITE_PAJAK	16.47	1.751	70
BROSUR_PAJAK	13.07	1.376	70

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PA JAK, WEBSITE_PAJAK a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.611 ^a	.374	.335	1.597	.374	9.706	4	65	.000

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.043	4	24.761	9.706	.000 ^a
	Residual	165.828	65	2.551		
	Total	264.871	69			

a. Predictors: (Constant), BROSUR_PAJAK, TEX_EXPO, SOSIALISASI_PAJAK, WEBSITE_PAJAK

b. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.416	3.461		-1.276	.207
	TEX_EXPO	.271	.152	.182	1.790	.078
	SOSIALISASI_PAJAK	.358	.122	.291	2.939	.005
	WEBSITE_PAJAK	.386	.114	.345	3.390	.001
	BROSUR_PAJAK	.431	.141	.303	3.066	.003

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14.15	19.07	16.76	1.198	70
Residual	-3.477	3.833	.000	1.550	70
Std. Predicted Value	-2.176	1.929	.000	1.000	70
Std. Residual	-2.177	2.400	.000	.971	70

a. Dependent Variable: WAJIB_PAJAK

RIWAYAT HIDUP



ARIF Lahir pada tanggal 07 Maret 1994 di Bakaru, merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara yang diamanahkan Allah SWT kepada pasangan Ayahanda tercinta Pawallangi dan Ibunda tercinta Sabaria.

Pada tahun 2007, penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri 155 Bakaru, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Pinrang, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah pinrang dan tamat pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun yang sama yakni 2013 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Akuntansi, mengambil program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.